



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka No.20, RT.11/RW.2, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830 Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531
Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 01357/ F.03.08/ 2023

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, memberi tugas kepada:

- Nama : **Matriwati, M.Pd.**
- Tugas : Penulis Bookchapter "Konsep Dasar Sistem Pendidikan" dengan Judul Sub Bab (Media Pembelajaran)
- Waktu : 31 Maret 2023
- Tempat : Batam
- Lain-lain : Setelah melaksanakan tugas agar membuat laporan tertulis kepada Pimpinan FKIP UHAMKA

Demikian surat tugas ini dibuat, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.

Jakarta, 25 Maret 2023

Dekan

Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.

Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri



KONSEP DASAR SISTEM PENDIDIKAN



b

Dr. Yusdin Bin Mahmudin Gagaramusu Lc.M.Ed

Dr. Hj. Umalihayati, S.ST., S.KM., M.Pd

M. Fathun Niam, S.Pd.I

Martriwati, M.Pd

Dr. Syarifuddin, M.I.Kom

Dewi Surani, S.S., M.Pd., MCE

Dr. Herie Saksono, M.Si



KONSEP DASAR SISTEM PENDIDIKAN

Disusun Oleh:

Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd

Mihrab Afnanda, S.Pd.I., M.Pd

Amir Mukminin, S.Pd.I., M.Pd

Dr. Yusdin Bin Mahmudin Gagaramusu Lc.M.Ed

Dr. Hj. Umalihayati, S.ST., S.KM., M.Pd

M. Fathun Niam, S.Pd.I

Martriwati, M.Pd

Dr. Syarifuddin, M.I.Kom

Dewi Surani, S.S., M.Pd., MCE

Dr. Herie Saksono, M.Si



**Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri**

KONSEP DASAR SISTEM PENDIDIKAN

Penulis:

Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd
Mihrab Afnanda, S.Pd.I., M.Pd
Amir Mukminin, S.Pd.I., M.Pd
Dr. Yusdin Bin Mahmudin Gagaramusu Lc.M.Ed
Dr. Hj. Umalihatyati, S.ST., S.KM., M.Pd
M. Fathun Niam, S.Pd.I
Martriwati, M.Pd
Dr. Syarifuddin, M.I.Kom
Dewi Surani, S.S., M.Pd., MCE
Dr. Herie Saksono, M.Si

Editor:

Paput Tri Cahyono

Penerbit:

Yayasan Cendikia Mulia Mandiri

Redaksi:

Perumahan Cipta No.1
Kota Batam, 29444
Email: cendikiamuliamandiri@gmail.com

ISBN: 978-623-8157-67-9

Terbit: Juni 2023

IKAPI: 011/Kepri/2022

Exp. 31 Maret 2024

Ukuran:

x hal + 203 hal;
14,8cm x 21cm

Cetakan Pertama, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang Keras Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan Cara Apapun
Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa *shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Prinsip-prinsip sistem pendidikan mencakup universalitas, kesetaraan, kesinambungan, relevansi, dan efisiensi. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan tentang bagaimana sistem pendidikan harus dirancang dan dijalankan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, tujuan sistem pendidikan adalah untuk memberdayakan individu, mengembangkan masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan-tujuan ini mencerminkan pentingnya pendidikan dalam menciptakan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Struktur sistem pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan melalui institusi-institusi resmi seperti sekolah dan universitas. Pendidikan nonformal terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti pelatihan kerja atau kursus. Sedangkan pendidikan informal terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman dan interaksi sosial.

Dalam keperluan itulah, buku **Konsep Dasar Sistem Pendidikan** ini sengaja penulis hadirkan untuk pembaca.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah berpartisipasi. Terakhir seperti kata pepatah bahwa” Tiada Gading Yang Tak Retak” maka penulisan buku ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan masukan yang dapat diberikan guna menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

....., Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I KONSEP DASAR SISTEM PENDIDIKAN.....	1
1.1. Sejarah Pendidikan	1
1.2. Filsafat Pendidikan	4
1.3. Tujuan Pendidikan	6
1.4. Kurikulum dan Pembelajaran.....	8
1.5. Rencana Pembelajaran.....	10
1.6. Metode dan Pendekatan Pembelajaran	13
1.7. Evaluasi dan Penilaian	15
1.8. Jenis-Jenis Evaluasi	18
BAB II KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	21
2.1. Landasan Filosofis Pendidikan.....	21
2.2. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Pendidikan....	23
2.3. Prinsip-Prinsip Kebijakan Pendidikan	26
2.4. Sistem Pendidikan.....	29
2.5. Struktur dan Tingkatan Pendidikan	29
2.6. Kebijakan Kurikulum	31
2.6.1. Kebijakan Pembelajaran dan Pengajaran ..	34
2.6.2. Kebijakan Penilaian dan Evaluasi.....	37
2.6.3. Kebijakan Ketersediaan dan Aksesibilitas	39
Pendidikan	

2.6.4.	Kebijakan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan.....	42
2.6.5.	Kebijakan Pembiayaan Pendidikan.....	45
BAB III KURIKULUM PENDIDIKAN		50
3.1.	Pengertian Kurikulum	50
3.2.	Peran Kurikulum	56
3.3.	Fungsi dan Tujuan Kurikulum	58
BAB IV EVALUASI PENDIDIKAN.....		63
4.1.	Pengertian Evaluasi Pendidikan	63
4.2.	Tujuan dan Manfaat Evaluasi Pendidikan.....	65
4.3.	Peran Evaluasi Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan	68
4.4.	Prinsip-Prinsip Evaluasi Pendidikan.....	70
4.5.	Jenis-Jenis Evaluasi Pendidikan	73
4.6.	Metode Evaluasi Pendidikan	76
4.7.	Etika dalam Evaluasi Pendidikan	78
BAB V MANAJEMEN PENDIDIKAN		81
5.1.	Konsep Manajemen.....	81
5.2.	Konsep Pendidikan.....	84
5.3.	Sumber Daya Manajemen Pendidikan.....	89
5.4.	Sumber Daya Manusia dalam Manajemen Pendidikan.....	95
BAB VI PENGEMBANGAN KURIKULUM.....		103
6.1.	Prinsip dan Pendekatan Pengembangan Kurikulum.....	103
6.2.	Analisis Kebutuhan Kurikulum	105
6.3.	Rancangan Kurikulum	108

6.4.	Pengembangan Materi Pembelajaran.....	110
6.5.	Pengembangan Evaluasi Pembelajaran	112
6.6.	Implementasi kurikulum	115
6.7.	Monitoring dan Evaluasi kurikulum.....	118
BAB VIII MEDIA PEMBELAJARAN		121
7.1.	Konsep Media Pembelajaran.....	121
7.1.1.	Alat Peraga.....	123
7.1.2.	Media Pembelajaran.....	126
7.1.3.	Sumber belajar.....	128
7.2.	Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran....	132
7.3.	Jenis dan Karakteristik Media Pembelajaran	134
7.4.	Teknik Pemilihan Media Pembelajaran	136
BAB VIII PENDIDIKAN KARAKTER.....		139
8.1.	Pendidikan Karakter	139
8.2.	Keberlanjutan dan Pengembangan Pendidikan Karakter.....	141
8.3.	Perbandingan Pendidikan Karakter di Berbagai Negara.....	144
8.4.	Tantangan dan Hambatan dalam Pendidikan Karakter.....	146
8.5.	Pengembangan Evaluasi Pembelajaran	148
8.6.	Evaluasi Kepribadian dan Keterampilan Sosial	151
8.7.	Strategi Implementasi Pendidikan Karakter	153
BAB IX TEKNOLOGI PENDIDIKAN.....		157

9.1.	Pengertian Teknologi Pendidikan.....	157
9.2.	Peran Teknologi Pendidikan	159
9.3.	Penerapan Teknologi Pendidikan	161
BAB X PENDIDIKAN INKLUSIF		163
10.1.	Pendidikan Inklusif.....	163
10.2.	Keberlanjutan Pendidikan Inklusif.....	167
10.3.	Lingkungan Pembelajaran Inklusif.....	170
10.4.	Tantangan dan Hambatan dalam Pendidikan Inklusif.....	173
10.5.	Dukungan Psikososial bagi Siswa dengan Kebutuhan Khusus	175
10.6.	Kolaborasi dan Partisipasi dalam Pendidikan Inklusif.....	178
DAFTAR PUSTAKA.....		183

BAB I

KONSEP DASAR SISTEM PENDIDIKAN

1.1. Sejarah Pendidikan

Sejarah pendidikan mencakup perkembangan dan evolusi sistem pendidikan dari zaman kuno hingga masa modern. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah pendidikan:

1. Zaman Kuno:

- Pendidikan di Mesir Kuno: Mesir Kuno memiliki sistem pendidikan formal yang terbatas pada kelas elit, yang meliputi pelatihan dalam bidang administrasi, agama, dan keterampilan praktis.
- Pendidikan di Yunani Kuno: Di Yunani Kuno, pendidikan dianggap penting dalam mengembangkan warga negara yang baik. Sistem pendidikan Yunani Kuno terdiri dari pendidikan fisik, musik, matematika, filsafat, dan retorika.

2. Zaman Klasik:

- Pendidikan Romawi: Pendidikan di Romawi Kuno bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara Romawi yang baik dan terlatih dalam keterampilan administrasi, retorika, dan hukum.
- Pendidikan di Tiongkok Kuno: Tiongkok Kuno memiliki sistem pendidikan yang terorganisir dengan baik, dengan penekanan pada nilai-nilai kepatuhan, disiplin, dan pengabdian kepada negara.

3. Abad Pertengahan:

- Pendidikan di Biara: Pada Abad Pertengahan, institusi biara menjadi pusat pendidikan utama di Eropa. Biara-biara mengajarkan agama, bahasa Latin, dan studi keagamaan lainnya.
- Pendidikan Islam: Pendidikan Islam berkembang pesat, dengan pendidikan agama dan bahasa Arab menjadi fokus utama.

4. Abad Pencerahan:

- Pendidikan di Eropa: Pada Abad Pencerahan, ide-ide baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan muncul.

Pendidikan sekuler menjadi lebih penting, dan sistem pendidikan umum mulai berkembang.

5. Abad ke-19:

- Gerakan Pendidikan Universal: Gerakan pendidikan universal mulai muncul, dengan dorongan untuk memberikan pendidikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.
- Pendidikan Modern: Sekolah-sekolah umum modern, kurikulum nasional, dan sistem wajib belajar mulai diperkenalkan di berbagai negara.

6. Abad ke-20:

- Inovasi Pendidikan: Abad ke-20 melihat inovasi pendidikan seperti pendekatan Montessori, pendidikan progresif, dan pendidikan inklusif.
- Teknologi dalam Pendidikan: Penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin berkembang, termasuk penggunaan media audiovisual, komputer, dan internet.

7. Masa Modern:

- Globalisasi Pendidikan: Globalisasi membawa perubahan dalam sistem

pendidikan dengan adanya peningkatan mobilitas siswa, program pertukaran internasional, dan pengakuan kualifikasi pendidikan antar negara.

- Pendekatan Berbasis Kompetensi: Ada pergeseran menuju pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja.

Sejarah pendidikan terus berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Setiap periode memiliki ciri khasnya sendiri, membentuk sistem pendidikan yang kita kenal saat ini.

1.2. Filsafat Pendidikan

Filsafat pendidikan mencakup berbagai perspektif, teori, dan konsep yang membahas tujuan, nilai, dan prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan. Berikut adalah beberapa pendekatan dan aliran filsafat pendidikan yang penting:

1. Perennialisme: Mengutamakan pendidikan yang berfokus pada kebenaran dan nilai-nilai abadi yang relevan sepanjang masa.

2. Essentialisme: Menekankan pentingnya pembelajaran inti dan pengetahuan yang mendasar sebagai dasar pendidikan yang kuat.
3. Progresivisme: Memandang pendidikan sebagai proses aktif dan kolaboratif yang menekankan pengembangan kreativitas, pemecahan masalah, dan penerapan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata.
4. Konstruktivisme: Menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman mereka.
5. Humanisme: Menempatkan manusia sebagai fokus utama pendidikan, dengan penekanan pada pengembangan potensi individu, nilai-nilai kemanusiaan, dan pertumbuhan pribadi.
6. Eksistensialisme: Menggarisbawahi kebebasan individu, otonomi, dan tanggung jawab pribadi dalam pendidikan serta pentingnya mencari makna hidup.
7. Kritisisme: Mendorong siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan analitis dalam memahami dunia dan melibatkan mereka dalam perubahan sosial yang positif.

8. Konstruksionisme: Menggabungkan konsep konstruktivisme dengan peran teknologi dan pembelajaran berbasis proyek untuk memfasilitasi eksplorasi dan kreativitas siswa.
9. Postmodernisme: Mengkritik gagasan kebenaran tunggal dan menekankan pentingnya multipleitas, keragaman, dan kompleksitas dalam pendidikan.
10. Pendidikan Holistik: Menganggap pendidikan sebagai integrasi seluruh aspek kehidupan dan pengembangan keseluruhan individu, termasuk aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.

Pendekatan dan aliran filsafat pendidikan ini memberikan landasan teoretis yang berbeda-beda untuk merancang pendekatan pembelajaran, kurikulum, dan evaluasi pendidikan. Penting untuk memahami berbagai perspektif ini dalam memahami esensi dan tujuan pendidikan.

1.3. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan hasil yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Berikut ini adalah beberapa tujuan umum dari pendidikan:

1. Meningkatkan Pengetahuan: Pendidikan bertujuan untuk menyediakan pengetahuan yang luas dan mendalam kepada individu dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, sejarah, matematika, bahasa, dan seni.
2. Pengembangan Keterampilan: Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan akademik dan praktis, seperti membaca, menulis, berhitung, berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan memecahkan masalah.
3. Pembentukan Karakter: Pendidikan bertujuan untuk membantu dalam pembentukan karakter dan moral individu, termasuk nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, toleransi, dan empati.
4. Persiapan Pekerjaan: Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja dan berkontribusi dalam masyarakat.
5. Pengembangan Kreativitas: Pendidikan bertujuan untuk merangsang dan mengembangkan kemampuan kreativitas dan

inovasi individu, baik dalam seni, ilmu pengetahuan, atau bidang lainnya.

6. Pemberdayaan Individu: Pendidikan bertujuan untuk memberdayakan individu agar mampu mengambil keputusan yang tepat, berpikir secara mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam masyarakat.
7. Pemahaman Antarbudaya: Pendidikan bertujuan untuk mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman budaya, etnis, dan agama dalam masyarakat global.
8. Pengembangan Potensi: Pendidikan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi individu dalam berbagai aspek, seperti bakat akademik, keterampilan olahraga, seni, musik, dan lain-lain.

1.4. Kurikulum dan Pembelajaran

Kurikulum dan pembelajaran saling terkait dan merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan. Berikut ini penjelasan singkat tentang kurikulum dan pembelajaran:

Kurikulum: Kurikulum adalah rencana keseluruhan yang mengatur apa yang harus diajarkan, bagaimana itu diajarkan, dan bagaimana hasil belajar akan dinilai

dalam suatu sistem pendidikan. Kurikulum mencakup tujuan pendidikan, struktur dan urutan materi pelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Kurikulum dapat disusun oleh pemerintah, badan pendidikan, atau lembaga pendidikan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang terstruktur dan menyeluruh.

Pembelajaran: Pembelajaran adalah proses di mana siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman melalui pengalaman belajar. Pembelajaran dapat terjadi di dalam kelas, di luar kelas, atau melalui pengalaman praktis. Ini melibatkan interaksi antara siswa, guru, dan materi pelajaran. Pembelajaran dapat didasarkan pada berbagai metode, termasuk ceramah, diskusi, kolaborasi, praktik, dan penelitian mandiri. Tujuan utama pembelajaran adalah mencapai hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.

Hubungan antara Kurikulum dan Pembelajaran: Kurikulum menentukan apa yang harus diajarkan dan bagaimana itu harus diajarkan, sementara pembelajaran melibatkan proses dimana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi dengan materi pelajaran dan pengajar. Kurikulum memberikan kerangka kerja dan pedoman bagi guru dalam

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Guru memilih strategi dan metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum untuk membantu siswa mencapai hasil belajar yang diinginkan.

Dalam praktiknya, guru mengimplementasikan kurikulum melalui perencanaan dan penyampaian pembelajaran yang relevan dengan siswa dan lingkungan belajar mereka. Evaluasi dan penilaian kemudian digunakan untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan kurikulum. Dengan demikian, kurikulum dan pembelajaran saling berinteraksi dan berdampak satu sama lain dalam mencapai hasil pendidikan yang diharapkan.

1.5. Rencana Pembelajaran

Rencana pembelajaran adalah dokumen yang merinci rincian tentang apa yang akan diajarkan, bagaimana cara mengajar, dan bagaimana siswa akan dinilai. Rencana pembelajaran memberikan panduan bagi guru dalam menyusun dan mengelola proses pembelajaran di kelas. Berikut adalah komponen-komponen umum yang ada dalam rencana pembelajaran:

1. Tujuan Pembelajaran: Tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai oleh siswa setelah

mengikuti pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas pada konteks pembelajaran tertentu.

2. Standar Pembelajaran: Standar pembelajaran merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dicapai oleh siswa dalam pembelajaran. Standar ini biasanya ditetapkan oleh lembaga pendidikan atau badan pemerintah yang berwenang.
3. Materi Pelajaran: Materi pelajaran mencakup topik atau konten yang akan diajarkan kepada siswa. Ini dapat berupa buku teks, sumber daya digital, materi audiovisual, atau bahan ajar lainnya yang relevan dengan topik pembelajaran.
4. Strategi Pengajaran: Strategi pengajaran merujuk pada metode dan pendekatan yang akan digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Ini dapat meliputi ceramah, diskusi, kerja kelompok, penugasan, presentasi multimedia, demonstrasi, atau penggunaan teknologi pembelajaran.
5. Penilaian dan Evaluasi: Komponen ini menjelaskan bagaimana siswa akan dinilai untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi pelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran.

Ini dapat melibatkan tugas tulis, ujian, proyek, presentasi, observasi, atau penilaian formatif yang berkelanjutan selama proses pembelajaran.

6. Rencana Kegiatan: Rencana kegiatan merinci langkah-langkah spesifik yang akan diambil oleh guru dalam proses pembelajaran. Ini mencakup urutan pembelajaran, alokasi waktu, penugasan tugas, penggunaan sumber daya pembelajaran, dan interaksi dengan siswa.
7. Penyesuaian dan Dukungan: Bagian ini mencakup strategi penyesuaian dan dukungan yang akan diberikan kepada siswa dengan kebutuhan khusus atau tingkat kemampuan yang berbeda. Ini dapat mencakup penggunaan pendekatan diferensiasi, penggunaan alat bantu pembelajaran, atau bantuan tambahan yang diperlukan.
8. Sumber Daya Pembelajaran: Sumber daya pembelajaran merujuk pada materi atau bahan pendukung yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Ini dapat mencakup buku teks, materi audiovisual, perangkat lunak komputer, bahan praktikum, dan sumber daya lain yang relevan.

9. Evaluasi dan Refleksi: Bagian ini berisi rencana untuk mengevaluasi efektivitas rencana pembelajaran dan refleksi terhadap hasil pembelajaran siswa. Guru akan menilai keberhasilan rencana pembelajaran, mengidentifikasi area perbaikan, dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk peningkatan pembelajaran di masa depan.

1.6. Metode dan Pendekatan Pembelajaran

Ada berbagai metode dan pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Berikut ini adalah beberapa contoh metode dan pendekatan pembelajaran yang umum digunakan:

1. Ceramah: Guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa melalui penjelasan verbal yang terstruktur. Metode ini lebih pasif dengan fokus pada pemindahan pengetahuan dari guru ke siswa.
2. Diskusi: Siswa secara aktif terlibat dalam berbagi ide, pendapat, dan pemahaman mereka tentang topik yang dibahas. Diskusi dapat dilakukan dalam kelompok kecil atau secara kelas.

3. Kerja Kelompok/Kolaboratif: Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Metode ini mendorong kerja sama, komunikasi, dan pemecahan masalah bersama.
4. Demonstrasi: Guru menggambarkan atau menunjukkan cara melakukan tugas atau keterampilan tertentu kepada siswa. Siswa dapat mengamati dan mempraktikkan apa yang telah ditunjukkan.
5. Pembelajaran Berbasis Proyek: Siswa terlibat dalam proyek jangka panjang yang memungkinkan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks nyata. Proyek ini melibatkan penyelidikan, penyelesaian masalah, dan presentasi hasil.
6. Pembelajaran Berbasis Masalah: Siswa diberikan situasi atau masalah yang nyata dan ditantang untuk menemukan solusi. Pendekatan ini mendorong pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan aplikasi pengetahuan.
7. Pembelajaran Berbasis Penemuan: Siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep atau prinsip tertentu melalui eksplorasi mandiri.

Guru berperan sebagai fasilitator dan siswa belajar melalui pengalaman langsung.

8. Pembelajaran Diferensiasi: Guru memodifikasi metode dan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa yang berbeda. Ini melibatkan penggunaan pendekatan yang berbeda dan penggunaan sumber daya yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan gaya belajar siswa.
9. Pembelajaran Berbasis Teknologi: Penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti perangkat lunak, aplikasi, multimedia, dan internet, untuk meningkatkan interaksi dan pengalaman belajar siswa.
10. Pembelajaran Berbasis Game: Penggunaan elemen permainan dalam pembelajaran untuk memotivasi siswa, memperkuat pemahaman, dan meningkatkan keterlibatan siswa.

1.7. Evaluasi dan Penilaian

Evaluasi dan penilaian adalah proses penting dalam pembelajaran yang digunakan untuk mengukur kemajuan, pencapaian, dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Evaluasi dan penilaian memberikan informasi kepada guru tentang sejauh mana tujuan

pembelajaran tercapai dan memberikan umpan balik kepada siswa untuk mengembangkan pemahaman mereka. Berikut ini adalah beberapa konsep yang terkait dengan evaluasi dan penilaian:

1. **Penilaian Formatif:** Penilaian formatif adalah proses terus-menerus yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan dan pemahaman siswa. Penilaian formatif dapat berupa pertanyaan kelas, diskusi, tugas kecil, atau aktivitas lain yang membantu guru dalam memberikan umpan balik kepada siswa untuk memperbaiki pemahaman mereka.
2. **Penilaian Sumatif:** Penilaian sumatif adalah penilaian akhir yang dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian siswa setelah selesainya suatu periode pembelajaran, seperti ujian akhir semester atau proyek akhir. Penilaian sumatif memberikan gambaran keseluruhan tentang pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan digunakan untuk memberikan penilaian akhir.
3. **Rubrik Penilaian:** Rubrik penilaian adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan kriteria dan standar yang akan dinilai dalam suatu tugas

atau proyek. Rubrik ini memberikan pedoman jelas kepada siswa tentang apa yang diharapkan dan memungkinkan guru memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif.

4. Portofolio: Portofolio adalah kumpulan kerja atau sampel hasil belajar siswa yang mencerminkan kemajuan dan pencapaian mereka dalam berbagai aspek pembelajaran. Portofolio dapat berisi tugas tulis, proyek, presentasi, atau catatan refleksi siswa.
5. Ujian dan Tes: Ujian dan tes digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran melalui pertanyaan pilihan ganda, esai, atau bentuk lain yang sesuai. Ujian dan tes ini dapat dilakukan secara tertulis atau melalui media digital.
6. Observasi: Observasi adalah pengamatan langsung terhadap siswa selama proses pembelajaran untuk mengamati partisipasi, pemahaman, dan keterampilan mereka. Observasi dapat dilakukan oleh guru atau sesama siswa.
7. Evaluasi Keterampilan: Evaluasi keterampilan melibatkan penilaian terhadap keterampilan praktis atau keterampilan spesifik yang terkait

dengan subjek tertentu, seperti keterampilan laboratorium, keterampilan seni, atau keterampilan olahraga.

1.8. Jenis-Jenis Evaluasi

Ada beberapa jenis evaluasi yang dapat dilakukan dalam konteks pendidikan. Berikut ini adalah beberapa jenis evaluasi umum:

1. **Evaluasi Formatif:** Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang berguna. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka dan memperbaiki kinerja mereka. Evaluasi formatif dapat dilakukan melalui pertanyaan kelas, tugas terstruktur, diskusi, atau observasi langsung.
2. **Evaluasi Sumatif:** Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian siswa secara keseluruhan. Ini melibatkan penilaian akhir berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Ujian akhir semester, proyek akhir, atau tugas akhir adalah contoh dari evaluasi sumatif.

3. **Evaluasi Diagnostik:** Evaluasi diagnostik dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman awal siswa. Evaluasi ini membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa.
4. **Evaluasi Formatif Terintegrasi:** Evaluasi formatif terintegrasi adalah penilaian yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran untuk mengukur pemahaman dan kemampuan siswa pada titik tertentu. Ini memungkinkan guru untuk memonitor kemajuan siswa secara berkelanjutan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
5. **Evaluasi Self-Assessment:** Evaluasi self-assessment melibatkan siswa dalam mengevaluasi diri sendiri terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ini mendorong siswa untuk merefleksikan pemahaman mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, dan mengatur tujuan belajar pribadi.
6. **Evaluasi Peer Assessment:** Evaluasi peer assessment melibatkan siswa dalam mengevaluasi kinerja satu sama lain. Siswa

memberikan umpan balik dan penilaian terhadap tugas atau presentasi sesama siswa. Ini mendorong kolaborasi, pembelajaran saling, dan pengembangan keterampilan penilaian.

7. Evaluasi Eksternal: Evaluasi eksternal dilakukan oleh pihak yang independen dari institusi atau lembaga pendidikan, seperti lembaga pengawas atau badan akreditasi. Evaluasi eksternal digunakan untuk menilai kualitas dan kepatuhan terhadap standar pendidikan yang ditetapkan.

BAB II

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

2.1. Landasan Filosofis Pendidikan

Landasan filosofis pendidikan adalah prinsip-prinsip atau keyakinan dasar yang menjadi dasar pemikiran dan pendekatan dalam pendidikan. Filosofi pendidikan membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang tujuan pendidikan, hakikat pengetahuan, peran guru dan siswa, serta hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Berikut adalah beberapa landasan filosofis pendidikan yang umum digunakan:

1. Idealisme: Mengutamakan nilai-nilai ide dan pemikiran sebagai tujuan utama pendidikan. Menekankan pada pengembangan kemampuan rasional dan pemahaman konseptual yang mendalam.
2. Realisme: Mengakui kenyataan objektif dan eksternal yang ada di luar individu. Mendorong pemahaman dan aplikasi pengetahuan yang konkret dan nyata.

3. Pragmatisme: Menekankan pentingnya penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Fokus pada pembelajaran yang relevan, pengalaman praktis, dan pemberdayaan siswa dalam memecahkan masalah.
4. Progresivisme: Memprioritaskan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan kolaboratif. Menekankan pada pengembangan keterampilan kritis, kemampuan berpikir mandiri, dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan.
5. Konstruktivisme: Memandang pembelajaran sebagai proses konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi. Fokus pada pemahaman berdasarkan interpretasi dan konstruksi mental siswa.
6. Humanisme: Menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam pendidikan. Menghargai keunikan individu, pemenuhan potensi pribadi, dan pembangunan keseluruhan individu.
7. Perennialisme: Menghargai pengetahuan dan nilai-nilai universal yang abadi. Menekankan pada studi klasik, etika, dan kebijaksanaan dalam pendidikan.

8. **Konstruksi sosial:** Mengakui peran penting interaksi sosial dan konteks budaya dalam pembentukan pengetahuan dan identitas individu. Menekankan pada pembelajaran kolaboratif, pemahaman budaya, dan keadilan sosial.

2.2. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Pendidikan

Tujuan dan sasaran kebijakan pendidikan berfokus pada hasil yang diharapkan dari sistem pendidikan. Tujuan ini mencerminkan visi dan misi pendidikan suatu negara atau wilayah, serta tujuan yang ingin dicapai dalam mengembangkan masyarakat melalui pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh tujuan dan sasaran umum kebijakan pendidikan:

1. **Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan:**
 - Meningkatkan partisipasi dan kesempatan pendidikan bagi semua individu, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status sosial, kecacatan, atau latar belakang budaya.
 - Mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
 - Meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok marginal dan rentan seperti anak-

anak miskin, anak berkebutuhan khusus, atau anak migran.

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan:
 - Meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil akademik siswa.
 - Mengembangkan kurikulum yang relevan, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
 - Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan, pengembangan profesional, dan pemantauan kinerja.
3. Mendorong Pendidikan Inklusif dan Merata:
 - Memastikan akses dan partisipasi pendidikan yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, anak perempuan, dan kelompok minoritas.
 - Mempromosikan lingkungan belajar yang inklusif, menghormati keberagaman dan mendorong kerjasama antar siswa.
4. Mengembangkan Keterampilan dan Kompetensi:
 - Mengembangkan keterampilan 21st century, termasuk keterampilan kritis, kreativitas, pemecahan masalah, kolaborasi, dan keterampilan digital.

- Memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan keterampilan vokasional yang relevan dengan dunia kerja.
5. Mendorong Pendidikan Karakter dan Nilai-nilai:
- Membentuk karakter yang baik, seperti integritas, tanggung jawab, empati, kerjasama, dan keadilan.
 - Mengembangkan kesadaran budaya, etika, dan tanggung jawab sosial.
6. Meningkatkan Efisiensi dan Keadilan dalam Pembiayaan Pendidikan:
- Memastikan alokasi anggaran yang memadai dan efisien untuk pendidikan.
 - Mendorong kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu.
 - Mencegah kesenjangan dalam pembiayaan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
7. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan:
- Meningkatkan efektivitas manajemen sekolah dan lembaga pendidikan.

- Memperkuat sistem penilaian dan evaluasi untuk pemantauan dan perbaikan berkelanjutan.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan pendidikan.

Setiap negara atau wilayah memiliki tujuan dan sasaran kebijakan pendidikan yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan kebutuhan pendidikan mereka. Tujuan dan sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, menciptakan masyarakat yang berpendidikan, serta mengembangkan potensi individu dan masyarakat secara holistik.

2.3. Prinsip-Prinsip Kebijakan Pendidikan

Prinsip-prinsip kebijakan pendidikan adalah panduan atau nilai-nilai dasar yang menjadi dasar pemikiran dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang

diharapkan. Berikut adalah beberapa contoh prinsip-prinsip umum dalam kebijakan pendidikan:

1. Keadilan: Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu dalam akses dan kesempatan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus berupaya mengatasi kesenjangan dan diskriminasi yang mungkin timbul berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, agama, status sosial, atau kecacatan.
2. Kesetaraan: Prinsip ini berkaitan erat dengan keadilan dan menekankan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua individu. Kebijakan pendidikan harus mengupayakan kesetaraan akses, partisipasi, dan perlakuan dalam pendidikan, tanpa membedakan latar belakang atau kondisi sosial ekonomi.
3. Inklusi: Prinsip ini berfokus pada penerimaan dan partisipasi semua individu dalam sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan harus mempromosikan pendidikan inklusif yang memungkinkan semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus atau kelompok marginal, untuk belajar bersama secara efektif.

4. **Kualitas:** Prinsip ini menekankan pentingnya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Kebijakan pendidikan harus mendukung pembelajaran yang berkualitas, termasuk pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas guru, dan penggunaan metode pembelajaran yang efektif.
5. **Relevansi:** Prinsip ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Kebijakan pendidikan harus mengakomodasi perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang terjadi agar pendidikan tetap relevan dan bermanfaat bagi siswa dan masyarakat.
6. **Keterbukaan:** Prinsip ini mengusung transparansi, partisipasi, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus melibatkan masyarakat, guru, siswa, orang tua, dan lembaga pendidikan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.
7. **Berkelanjutan:** Prinsip ini menekankan keberlanjutan kebijakan pendidikan dalam jangka panjang. Kebijakan pendidikan harus

didesain dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang, memastikan sumber daya yang berkelanjutan, dan merespons perubahan kebutuhan pendidikan seiring waktu.

2.4. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan merujuk pada struktur dan organisasi pendidikan di suatu negara atau wilayah. Ini mencakup kebijakan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi, pembiayaan, dan manajemen sekolah. Sistem pendidikan berperan penting dalam membentuk pendidikan formal dan memberikan arah dalam mencapai tujuan pendidikan.

2.5. Struktur dan Tingkatan Pendidikan

Struktur dan tingkatan pendidikan dapat bervariasi antara negara dan sistem pendidikan. Namun, secara umum, berikut adalah contoh struktur dan tingkatan pendidikan yang umum ditemui:

1. Pendidikan Pra-Sekolah:
 - Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA): Biasanya untuk anak usia 3-6 tahun.
2. Pendidikan Dasar:

- Sekolah Dasar (SD) atau Rendah: Biasanya untuk anak usia 6-12 tahun.
 - Madrasah Ibtidaiyah (MI): Sekolah dasar dengan pendekatan keagamaan.
3. Pendidikan Menengah:
- Sekolah Menengah Pertama (SMP): Biasanya untuk anak usia 12-15 tahun.
 - Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Biasanya untuk anak usia 15-18 tahun.
4. Pendidikan Tinggi:
- Diploma: Program pendidikan vokasional atau teknis setelah menyelesaikan pendidikan menengah.
 - Sarjana (S1): Program pendidikan tingkat universitas yang biasanya berlangsung selama 3-4 tahun.
 - Magister (S2): Program pendidikan lanjutan setelah sarjana yang biasanya berlangsung selama 1-2 tahun.
 - Doktor (S3): Program pendidikan tingkat tertinggi yang biasanya berlangsung selama 3-5 tahun.

Selain tingkatan di atas, ada juga pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang melibatkan pembelajaran di luar lingkungan formal sekolah. Ini termasuk kursus pelatihan, pelatihan keterampilan, pendidikan jarak jauh, dan sebagainya.

Perlu dicatat bahwa struktur dan tingkatan pendidikan dapat berbeda antara negara dan wilayah. Ada juga variasi dalam terminologi dan sistem klasifikasi yang digunakan. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada sistem pendidikan khusus suatu negara atau wilayah ketika mempelajari struktur dan tingkatan pendidikan secara lebih rinci.

2.6. Kebijakan Kurikulum

Kebijakan kurikulum merujuk pada keputusan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum dalam sistem pendidikan. Kebijakan kurikulum memiliki peran penting dalam menentukan tujuan pendidikan, isi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian siswa. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan kurikulum meliputi tujuan pendidikan nasional, nilai-nilai sosial dan budaya, kebutuhan dan harapan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam kebijakan kurikulum:

1. Penentuan Tujuan: Kebijakan kurikulum harus menetapkan tujuan pendidikan yang jelas dan terukur. Tujuan ini dapat mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam perkembangan siswa.
2. Isi Pembelajaran: Kebijakan kurikulum harus menentukan isi pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diharapkan siswa kuasai. Isi pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman serta mencerminkan nilai-nilai budaya dan moral masyarakat.
3. Metode Pengajaran: Kebijakan kurikulum harus memberikan pedoman mengenai metode dan pendekatan pengajaran yang efektif. Ini termasuk pemilihan strategi pembelajaran, penggunaan teknologi pendidikan, dan pengembangan keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran.
4. Penilaian: Kebijakan kurikulum harus mencakup pedoman mengenai penilaian dan evaluasi siswa. Ini meliputi penggunaan berbagai alat penilaian,

seperti tes, proyek, tugas, dan penilaian formatif untuk mengukur kemajuan belajar siswa.

5. **Fleksibilitas dan Adaptabilitas:** Kebijakan kurikulum harus memberikan ruang bagi sekolah dan guru untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Hal ini penting agar kurikulum dapat merespons perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan lingkungan pendidikan.
6. **Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Kebijakan kurikulum harus mendorong keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui proses konsultasi, partisipasi, dan pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi kurikulum.
7. **Pembaruan dan Evaluasi:** Kebijakan kurikulum harus memberikan kerangka kerja untuk pembaruan dan evaluasi berkala terhadap kurikulum. Hal ini penting untuk mengikuti perkembangan pengetahuan, memperbaiki kelemahan dalam kurikulum yang ada, dan memastikan kesesuaian kurikulum dengan tujuan pendidikan.

2.6.1. Kebijakan Pembelajaran dan Pengajaran

Kebijakan pembelajaran dan pengajaran merujuk pada keputusan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan untuk mempromosikan praktik pembelajaran dan pengajaran yang efektif di semua tingkat pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pengajaran, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa, dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin dicakup dalam kebijakan pembelajaran dan pengajaran:

1. **Standar Pembelajaran:** Kebijakan ini menetapkan standar atau kriteria yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Ini mencakup kompetensi siswa, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan mereka kuasai.
2. **Metode Pengajaran:** Kebijakan ini menyediakan pedoman mengenai metode pengajaran yang efektif. Ini mencakup strategi dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, penerapan

teknologi pendidikan, integrasi pembelajaran aktif, kolaboratif, dan reflektif.

3. Peningkatan Kualitas Guru: Kebijakan ini berfokus pada pengembangan profesionalisme dan kompetensi guru. Ini meliputi rencana pengembangan profesional, pelatihan berkelanjutan, peningkatan kemampuan pengajaran, dan pemberian dukungan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif.
4. Pembelajaran Inklusif: Kebijakan ini menekankan pentingnya pembelajaran inklusif yang mengakomodasi kebutuhan semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Ini meliputi strategi diferensiasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi bantu, dan pengembangan lingkungan pembelajaran yang ramah bagi semua siswa.
5. Evaluasi Pembelajaran: Kebijakan ini mencakup penilaian dan evaluasi yang komprehensif terhadap prestasi siswa. Ini termasuk penggunaan berbagai alat penilaian, metode penilaian formatif dan

sumatif, serta pelaporan hasil evaluasi kepada siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya.

6. Penggunaan Sumber Belajar: Kebijakan ini membahas penggunaan sumber belajar yang relevan, mutakhir, dan bervariasi dalam proses pembelajaran. Ini mencakup penggunaan buku teks, materi digital, sumber daya daring, perpustakaan, dan sumber daya pembelajaran lainnya.
7. Pengelolaan Kelas dan Disiplin: Kebijakan ini berfokus pada strategi dan pedoman pengelolaan kelas yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan disiplin, serta mendukung kesejahteraan siswa.
8. Keterlibatan Orang Tua: Kebijakan ini mendorong keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ini meliputi komunikasi yang efektif antara sekolah dan orang tua, kegiatan partisipatif, serta dukungan orang tua dalam mendukung pembelajaran di rumah.

2.6.2. Kebijakan Penilaian dan Evaluasi

Kebijakan penilaian dan evaluasi merujuk pada keputusan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan untuk mengevaluasi kemajuan dan prestasi siswa, guru, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kebijakan ini berfungsi untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan, memantau kualitas pembelajaran, dan memberikan umpan balik yang relevan untuk meningkatkan proses pembelajaran.

Berikut adalah beberapa aspek yang dapat mencakup kebijakan penilaian dan evaluasi:

1. Jenis-jenis Penilaian: Kebijakan ini menetapkan jenis-jenis penilaian yang digunakan dalam sistem pendidikan, seperti tes tulis, tes lisan, tugas proyek, penugasan praktis, observasi kelas, dan penilaian portofolio. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan siswa dan pencapaian tujuan pembelajaran.
2. Tujuan Penilaian: Kebijakan ini menjelaskan tujuan penilaian, baik itu untuk mengevaluasi pencapaian individual siswa, memonitor kualitas pembelajaran,

atau mengidentifikasi kebutuhan pendidikan. Tujuan penilaian dapat mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dari pembelajaran.

3. Proses Penilaian: Kebijakan ini mencakup pedoman mengenai proses penilaian, seperti waktu pelaksanaan, prosedur pengumpulan data, pemberian umpan balik kepada siswa, dan pelaporan hasil penilaian. Proses penilaian harus adil, valid, reliabel, dan transparan.
4. Evaluasi Guru: Kebijakan ini mencakup penilaian kinerja guru sebagai bagian dari sistem penilaian dan evaluasi. Evaluasi ini dapat melibatkan observasi kelas, penilaian portofolio, wawancara, atau instrumen penilaian lainnya. Tujuan evaluasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif.
5. Evaluasi Program dan Kurikulum: Kebijakan ini mencakup evaluasi program dan kurikulum secara periodik untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pendidikan, perubahan kebutuhan

masyarakat, dan kemajuan pengetahuan. Evaluasi ini melibatkan analisis kurikulum, penggunaan data hasil penilaian, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

6. Penggunaan Hasil Penilaian: Kebijakan ini menentukan bagaimana hasil penilaian digunakan untuk menginformasikan keputusan terkait pendidikan, seperti penempatan siswa, promosi, sertifikasi guru, pengembangan kurikulum, dan perbaikan program pembelajaran.
7. Pemantauan dan Akuntabilitas: Kebijakan ini mencakup sistem pemantauan dan akuntabilitas untuk memastikan implementasi yang tepat dari kebijakan penilaian dan evaluasi. Ini termasuk pengawasan, pelaporan hasil, dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

2.6.3. Kebijakan Ketersediaan dan Aksesibilitas Pendidikan

Kebijakan ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas tersedia bagi semua

individu tanpa diskriminasi dan dengan meminimalkan hambatan akses. Kebijakan ini berfokus pada upaya untuk mencapai inklusi pendidikan, mereduksi kesenjangan pendidikan, dan memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Berikut adalah beberapa aspek yang dapat mencakup kebijakan ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan:

1. Pendidikan Universal: Kebijakan ini mendorong ketersediaan pendidikan yang mencakup semua individu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, kecacatan, status sosial, atau latar belakang budaya. Pendidikan universal berarti bahwa semua anak dan orang dewasa memiliki akses ke pendidikan dasar dan menengah yang layak.
2. Infrastruktur Pendidikan: Kebijakan ini mencakup pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti pembangunan dan perawatan sekolah, fasilitas belajar,

transportasi, dan aksesibilitas fisik bagi individu dengan kebutuhan khusus.

3. **Ketersediaan Guru dan Tenaga Pendidik:** Kebijakan ini menjamin ketersediaan guru dan tenaga pendidik yang berkualitas, terlatih, dan memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Ini melibatkan rekrutmen, pelatihan, dan penempatan guru yang efektif, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang.
4. **Program Pendidikan Inklusif:** Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu dengan kebutuhan khusus atau kelompok marginalisasi memiliki akses penuh ke pendidikan yang inklusif. Ini melibatkan penyediaan dukungan, layanan pendukung, dan modifikasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan mereka.
5. **Penghapusan Hambatan Finansial:** Kebijakan ini mengatasi hambatan finansial yang dapat menghalangi akses pendidikan. Ini termasuk program beasiswa, bantuan keuangan, atau kebijakan pembebasan biaya sekolah bagi

- individu atau keluarga yang kurang mampu.
6. Pendekatan Multikultural dan Bahasa: Kebijakan ini mempromosikan pendekatan multikultural dan bahasa dalam pendidikan. Ini mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap budaya, bahasa, dan identitas individu, serta penguatan pendidikan bahasa asli atau pendidikan bahasa kedua.
 7. Pendekatan Teknologi dan Pembelajaran Jarak Jauh: Kebijakan ini mendorong penggunaan teknologi pendidikan dan pendekatan pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan akses pendidikan. Ini melibatkan pengembangan infrastruktur teknologi, kurikulum online, dan pelatihan guru dalam penggunaan teknologi.

2.6.4. Kebijakan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan

Kebijakan manajemen dan tata kelola pendidikan mengacu pada keputusan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan untuk mengatur dan mengelola sistem

pendidikan secara efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan serta proses pembelajaran.

Berikut adalah beberapa aspek yang dapat mencakup kebijakan manajemen dan tata kelola pendidikan:

1. Kebijakan Kepemimpinan Pendidikan: Kebijakan ini berkaitan dengan pengembangan kepemimpinan yang efektif di tingkat lembaga pendidikan. Ini melibatkan seleksi, pelatihan, dan penilaian kepala sekolah serta pimpinan pendidikan lainnya, untuk memastikan adanya pemimpin yang berkualitas yang mampu mengarahkan lembaga pendidikan menuju tujuan yang diinginkan.
2. Penyusunan Kebijakan: Kebijakan ini menetapkan proses penyusunan kebijakan pendidikan yang partisipatif dan transparan. Hal ini melibatkan pemangku kepentingan pendidikan, seperti guru, orang tua, siswa, dan masyarakat, dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan.

3. Rencana Strategis Pendidikan: Kebijakan ini melibatkan penyusunan rencana strategis jangka panjang untuk pengembangan sistem pendidikan. Rencana ini mencakup tujuan, strategi, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek pendidikan.
4. Manajemen Sumber Daya: Kebijakan ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pendidikan, termasuk anggaran, personel, infrastruktur, dan peralatan. Kebijakan ini memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas.
5. Akuntabilitas Pendidikan: Kebijakan ini menetapkan mekanisme akuntabilitas yang jelas bagi lembaga pendidikan, termasuk pemantauan kinerja, evaluasi, dan pelaporan hasil. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan bertanggung jawab terhadap kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan.

6. Kerjasama Stakeholder: Kebijakan ini mendorong kerjasama dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait pendidikan. Ini mencakup kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan komunitas dalam memajukan pendidikan.
7. Evaluasi Kebijakan: Kebijakan ini menetapkan proses evaluasi yang teratur terhadap implementasi kebijakan pendidikan. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan umpan balik untuk memastikan kebijakan pendidikan dapat diperbaiki dan disesuaikan sesuai kebutuhan.

2.6.5. Kebijakan Pembiayaan Pendidikan

Kebijakan pembiayaan pendidikan adalah serangkaian keputusan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan untuk mengatur dan mengelola pendanaan sistem pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan sumber daya keuangan yang cukup, adil, dan berkelanjutan

untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Berikut ini adalah beberapa poin yang dapat mencakup kebijakan pembiayaan pendidikan:

1. Anggaran Pendidikan: Kebijakan ini melibatkan penetapan alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan. Pemerintah dapat menetapkan persentase tertentu dari anggaran nasional untuk pendidikan dan mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pendidikan.
2. Keadilan dan Keterjangkauan: Kebijakan ini berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh individu atau keluarga tidak menjadi hambatan yang tidak terjangkau. Ini dapat melibatkan program beasiswa, bantuan keuangan, atau kebijakan pembebasan biaya sekolah bagi individu atau keluarga yang kurang mampu.
3. Pendanaan Infrastruktur Pendidikan: Kebijakan ini mempertimbangkan alokasi dana untuk pembangunan dan perawatan

infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan sekolah, perbaikan fasilitas, pengadaan peralatan, dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

4. Kebijakan Pembiayaan Perguruan Tinggi: Kebijakan ini melibatkan pemikiran tentang pendanaan pendidikan tinggi. Ini mencakup kebijakan pinjaman pendidikan, program beasiswa, kerjasama dengan sektor swasta, dan pengembangan model pendanaan alternatif.
5. Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan: Kebijakan ini menetapkan tata kelola keuangan yang baik untuk pendidikan. Ini mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan, audit keuangan, transparansi penggunaan dana, dan pencegahan korupsi atau penyalahgunaan keuangan.
6. Kebijakan Kemitraan Publik-Swasta: Kebijakan ini mengatur dan mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan pendidikan. Ini dapat melibatkan investasi swasta dalam pendidikan, pendanaan perusahaan, atau

program kemitraan dengan lembaga swasta untuk mendukung pendidikan.

7. Pengelolaan Dana Donasi dan Hibah: Kebijakan ini mengatur penggunaan dan pengelolaan dana donasi dan hibah dalam pendidikan. Hal ini melibatkan pengembangan kebijakan untuk menerima dan mengalokasikan dana yang diberikan oleh organisasi atau individu untuk mendukung pendidikan.

BAB III

KURIKULUM PENDIDIKAN

3.1. Pengertian Kurikulum

Banyak orang yang menganggap kurikulum berkaitan dengan bahan ajar atau buku-buku pelajaran yang harus dimiliki anak didik, sehingga perubahan kurikulum identik dengan perubahan buku pelajaran. Persoalan kurikulum bukan hanya persoalan buku ajar, akan tetapi banyak persoalan lainnya termasuk persoalan arah dan tujuan pendidikan, persoalan materi pelajaran, serta persoalan-persoalan lainnya yang terkait dengan hal itu. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani Kuno yang berasal dari kata *curir* dan *curere*. Selanjutnya istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda itu, ada juga kesamaan. Kesamaan tersebut adalah, bahwa kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. (Sanjaya, 2008:3)

Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam UUD No. 20 tahun 2003, Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional.

1. Kurikulum Sebagai Suatu Program Kegiatan yang Terencana.

Berdasarkan pandangan komprehensif terhadap setiap kegiatan yang direncanakan untuk dialami seluruh siswa, kurikulum berupaya menggabungkan ruang lingkup, rangkaian, interpretasi, keseimbangan *subject matter*, teknik mengajar, dan hal lain yang dapat direncanakan sebelumnya (Saylor, Alexander, dan Lewis, 1986). (Hamalik, 2007:5)

2. Kurikulum Sebagai Hasil Belajar Yang Diharapkan.

Beberapa penulis kurikulum (Johnson, 1977 dan Posner, 1982) menyatakan bahwa kurikulum

seharusnya tidak dipandang sebagai aktivitas, tetapi difokuskan secara langsung pada berbagai hasil belajar yang diharapkan (*Intended learning outcomes*). Kajian ini menekankan perubahan cara pandang kurikulum, dari kurikulum sebagai alat (*means*) menjadi kurikulum sebagai tujuan atau akhir yang akan dicapai (*ends*). Salah satu alasan utama adalah karena hasil belajar yang diharapkan merupakan dasar bagi perencanaan dan perumusan berbagai tujuan kegiatan pembelajaran. (Hamalik, 2007:6)

3. Kurikulum Sebagai Reproduksi Kultural (*Cultural Reproduction*).

Sekolah bertugas memproduksi pengetahuan dan nilai-nilai yang penting bagi generasi penerus. Masyarakat, negara atau bangsa bertanggung jawab mengidentifikasi keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan berbagai apresiasi yang akan diajarkan. Sementara itu, pihak pendidik profesional bertanggung jawab untuk melihat apakah *skill*, *knowledge*, dan apresiasi tersebut sudah diinformasikan ke dalam kurikulum yang dapat disampaikan kepada anak-anak dan generasi muda.

Beberapa contoh dari pandangan kurikulum sebagai reproduksi kultural ini adalah berbagai peristiwa patriotik dalam sejarah nasional, sistem ekonomi yang dominan (komunistik atau kapitalistik), berbagai konvensi kebudayaan, kebiasaan, dan aturan adat istiadat (*lore dan folkways*), serta nilai-nilai agama yang ada di berbagai sekolah yang bernaung di bawah lembaga keagamaan seperti *parochial school* dan sekolah-sekolah umumnya. (Hamalik, 2007:6)

4. Kurikulum Sebagai Kumpulan Tugas dan Konsep Diskrit.

Pandangan ini berpendapat bahwa kurikulum merupakan satu kumpulan tugas dan konsep (*discrete tasks and concept*) yang harus dikuasai siswa. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa penguasaan tugas-tugas yang saling bersifat diskrit (berdiri sendiri) tersebut adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Biasanya, tujuan yang dimaksud memiliki interpretasi behavioral yang spesifik, misalnya mempelajari suatu tugas baru atau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Pendekatan ini berkembang dari program-

program *training* dalam bisnis, industri, dan kemiliteran. (Hamalik, 2007:7)

5. Kurikulum Sebagai Agenda Rekonstruksi Sosial.
Sejauh mana keberanian sekolah membangun suatu tatanan sosial yang baru (*Dare the school build a new social order*)? Pertanyaan ini merupakan judul karya George S. Counts (1932) yang dipandang sebagai salah seorang perintis rekonstruksionisme sosial dalam pendidikan. Ide Counts tersebut banyak diperjuangkan oleh Theodore Brameld dalam dekade 1940-an dan 1950-an, yang banyak terinspirasi pemikiran Dewey. Pandangan ini berpendapat bahwa sekolah harus mempersiapkan suatu agenda pengetahuan dan nilai-nilai yang diyakini dapat menuntun siswa memperbaiki masyarakat dan institusi kebudayaan, serta berbagai keyakinan dan kegiatan praktik yang mendukungnya. (Hamalik, 2007:8)
6. Kurikulum Sebagai Currere.
Salah satu pandangan yang paling mutakhir terhadap dimensi kurikulum adalah yang pandangan yang menekankan pada bentuk kata kerja kurikulum itu sendiri, yaitu currere. Sebagai pengganti interpretasi dari etimologi

karena pacu ataulomba (*race course*) kurikulum, currere merujuk pada jalannya lomba dan menekankan masing-masing kapasitas individu untuk merekonseptualisasi otobiografinya sendiri. Dengan demikian, karakter kurikulum membentuk dan dibentuk oleh berbagai hubungan eksternal dengan pengetahuan, perspektif, dan prakti-praktik dalam domain kependidikan lainnya seperti administrasi, supervisi, dasar-dasar pendidikan (sejarah dan filsafat pendidikan, termasuk sosiologi, politik, ekonomi, antropologi bahkan perspektif sastra), studi kebijakan, evaluasi, metodologi penelitian, *subject areas*, jenjang dan tingkatan pendidikan, pengajaran, pendidikan khusus, psikologi pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena beberapa di antara bidang diatas memiliki relevansi langsung dengan kurikulum jika dibandingkan dengan bidang lainnya, maka bidang-bidang yang lebih relevan tersebut perlu dianalisis secara lebih luas dan mendalam. (Hamalik, 2007:8)

3.2. Peran Kurikulum

Sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis, kurikulum mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan siswa. Apabila dianalisis sifat dari masyarakat dan kebudayaan, dengan sekolah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan operasinya, maka dapat ditentukan paling tidak tiga peranan kurikulum yang sangat penting, yakni peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif. Ketiga peranan ini sama penting dan perlu dilaksanakan secara seimbang.

1. Peranan Konservatif

Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial pada generasi muda. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat memengaruhi dan membina tingkahlaku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang ada dalam masyarakat, sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Ini seiring dengan hakikat pendidikan itu sendiri, yang berfungsi sebagai jembatan antara para siswa selaku anak didik dengan orang dewasa, dalam suatu proses pembudayaan yang semakin berkembang menjadi lebih kompleks.

Oleh karenanya, dalam kerangka ini fungsi kurikulum menjadi teramat penting, karena ikut membantu proses tersebut. Dengan adanya peranan konservatif ini, maka sesungguhnya kurikulum itu berorientasi pada masa lampau. Meskipun demikian, peranan ini sangat mendasar sifatnya. (Hamalik, 2007:12)

2. Peranan Kritis atau Evaluatif

Kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah. Sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih berbagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan di masa mendatang dihilangkan, serta diadakan modifikasi dan perbaikan. Dengan demikian, kurikulum harus merupakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu. (Hamalik, 2007:12)

3. Peranan Kreatif

Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif, dalam artian menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di

masa sekarang dan masa mendatang. Untuk membantu setiap individu dalam mengembangkan semua potensi yang ada padanya, maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru, yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketiga peran kurikulum tersebut harus berjalan secara seimbang, atau dengan kata lain terdapat keharmonisan di antara ketiganya. Dengan demikian, kurikulum dapat memenuhi tuntutan waktu dan keadaan dalam membawa siswa menuju kebudayaan masa depan. (Hamalik, 2007:12)

3.3. Fungsi dan Tujuan Kurikulum

Disamping memiliki peranan, kurikulum juga mengemban fungsi tertentu. Sesuai dengan peran yang haru “dimainkan” kurikulum sebagai alat dan pedoman pendidikan, maka isi kurikulum harus sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Mengapa demikian? Sebab tujuan yang harus di capai oleh pendidikan pada dasarnya mengkrystal dalam pelaksanaan perannya itu sendiri. Dilihat dari cakupan dan tujuannya menurut McNeil (1990) isi kurikulum memiliki empat fungsi,

yaitu (1) fungsi pendidikan umum (*common and general education*), (2) Suplementasi (*supplementation*), (3) eksplorasi (*exploration*), dan (4) Keahlian (*specialization*). (Sanjaya, 2008:12)

1. Fungsi Pendidikan Umum (*common and general education*)

Fungsi pendidikan umum (*common and general education*), yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Kurikulum harus memberikan pengalaman belajar kepada setiap peserta didik agar mampu menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan, memahami setiap hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial. Dengan demikian, fungsi kurikulum ini harus diikuti oleh setiap siswa pada jenjang dan level atau jenis pendidikan manapun.

2. Suplementasi (*supplementation*)

Setiap peserta didik memiliki perbedaan baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat, maupun perbedaan bakat. Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. Dengan

demikian, setiap anak memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Artinya, peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata harus terlayani untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal; sebaliknya siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata juga harus terlayani sesuai dengan kemampuannya.

3. Eksplorasi (*exploration*)

Fungsi eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Melalui fungsi ini siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga memungkinkan mereka akan belajar tanpa adanya paksaan. Namun demikian, proses eksplorasi terhadap minat dan bakat siswa bukan pekerjaan yang mudah. Adakalanya terjadi pemaksaan dari pihak luar, misalnya para orangtua, yang sebenarnya anak tidak memiliki bakat dan minat terhadap bidang tertentu, mereka dipaksa untuk memilihnya hanya karena alasan-alasan tertentu yang sebenarnya tidak rasional. Oleh sebab itu para

pengembang kurikulum mesti dapat menggali rahasia keberbakatan anak yang kadang-kadang tersembunyi. (Sanjaya, 2008:13)

4. Keahlian (*spesialization*)

Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Dengan demikian, kurikulum harus memberikan pilihan berbagai bidang keahlian, misalnya perdagangan, pertanian, industri atau disiplin akademik. Bidang-bidang semacam itu yang diberikan sebagai pilihan, yang pada akhirnya setiap peserta didik memiliki keterampilan-keterampilan sesuai dengan bidang spesialisasinya. Untuk itu pengembangan kurikulum harus melibatkan para spesialis untuk menentukan kemampuan apa yang harus dimiliki setiap siswa sesuai dengan bidang keahliannya. (Sanjaya, 2008:13)

BAB IV

EVALUASI PENDIDIKAN

4.1. Pengertian Evaluasi Pendidikan

Pengertian Evaluasi Pendidikan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi yang relevan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Evaluasi pendidikan melibatkan pengumpulan data dan informasi tentang proses, hasil, dan dampak pembelajaran dan pengajaran. Tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keberhasilan, kelemahan, dan perbaikan yang dapat dilakukan dalam konteks pendidikan.

Evaluasi pendidikan melibatkan penggunaan berbagai metode dan teknik untuk mengumpulkan data, seperti observasi kelas, tes dan penilaian kinerja, angket, wawancara, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat

kepada peserta didik, guru, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengertian evaluasi pendidikan juga mencakup prinsip-prinsip evaluasi yang meliputi validitas (apakah evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur), reliabilitas (apakah evaluasi menghasilkan hasil yang konsisten), objektivitas (apakah evaluasi bebas dari bias), dan transparansi (apakah proses evaluasi dapat dipahami dan diakses oleh semua pihak yang terlibat).

Evaluasi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan pemahaman tentang keberhasilan pembelajaran, efektivitas pengajaran, kebutuhan pengembangan profesional, perbaikan kurikulum, dan pengambilan keputusan pendidikan yang berdasarkan bukti.

Penting untuk dicatat bahwa pengertian evaluasi pendidikan dapat bervariasi tergantung pada konteks, pendekatan, dan pemahaman individu. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada sumber-sumber referensi yang relevan dan diverifikasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang evaluasi pendidikan.

4.2. Tujuan dan Manfaat Evaluasi Pendidikan

Tujuan Evaluasi Pendidikan:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Evaluasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, kurikulum, dan pengajaran. Tujuan ini mencakup pemahaman yang lebih baik tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.
2. Memantau Kemajuan dan Pencapaian: Evaluasi pendidikan digunakan untuk memantau kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi tingkat pencapaian individu atau kelompok siswa dan menilai efektivitas program pendidikan.
3. Menyediakan Umpan Balik: Evaluasi pendidikan memberikan umpan balik yang berharga kepada peserta didik, guru, dan lembaga pendidikan. Umpan balik ini membantu peserta didik memahami kekuatan dan kelemahan mereka, memperbaiki keterampilan dan pengetahuan mereka, dan mengembangkan pola pikir reflektif.

4. Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti: Evaluasi pendidikan menyediakan informasi dan data yang penting untuk pengambilan keputusan pendidikan. Keputusan tentang pengembangan kurikulum, peningkatan pengajaran, pemilihan metode pembelajaran, dan pengalokasian sumber daya dapat diambil berdasarkan bukti yang diperoleh dari evaluasi pendidikan.
5. Akuntabilitas: Evaluasi pendidikan membantu dalam memastikan akuntabilitas dalam sistem pendidikan. Evaluasi membantu menilai sejauh mana lembaga pendidikan mencapai tujuan mereka, memenuhi standar kualitas, dan memberikan pendidikan yang efektif kepada peserta didik.

Manfaat Evaluasi Pendidikan:

1. Perbaikan Kontinu: Evaluasi pendidikan memberikan wawasan tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam pendidikan. Hal ini memungkinkan pengembangan program dan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan pembelajaran dan pengajaran.
2. Penyesuaian Pembelajaran: Evaluasi pendidikan membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan

individual peserta didik dan mengadaptasi metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan efektif dalam pembelajaran.

3. Peningkatan Kualitas Pengajaran: Evaluasi pendidikan memberikan umpan balik yang berharga kepada guru tentang kualitas pengajaran mereka. Dengan demikian, guru dapat mengidentifikasi area pengembangan mereka, meningkatkan keterampilan pengajaran, dan mengadopsi strategi yang lebih efektif.
4. Evaluasi Program dan Kebijakan: Evaluasi pendidikan membantu dalam mengevaluasi keberhasilan program dan kebijakan pendidikan. Informasi yang diperoleh dari evaluasi digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang ada, serta menginformasikan pengembangan program dan kebijakan baru.
5. Transparansi dan Pertanggungjawaban: Evaluasi pendidikan memberikan transparansi dalam hasil pendidikan dan memastikan

pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan pendidikan.

Penting untuk dicatat bahwa manfaat evaluasi pendidikan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan evaluasi yang spesifik. Setiap lembaga pendidikan mungkin memiliki manfaat yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan fokus mereka.

4.3. Peran Evaluasi Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan

Peran Evaluasi Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan sangat penting. Berikut adalah beberapa peran utama evaluasi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan:

1. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan: Evaluasi pendidikan membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan, kurikulum, pengajaran, dan pembelajaran. Dengan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, lembaga pendidikan dapat fokus pada pengembangan yang relevan dan perbaikan yang diperlukan.
2. Pemantauan Kemajuan dan Pencapaian: Evaluasi pendidikan memantau kemajuan peserta didik

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengukur efektivitas program dan intervensi pendidikan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pencapaian peserta didik.

3. Umpan Balik untuk Perbaikan: Evaluasi pendidikan memberikan umpan balik yang berharga kepada peserta didik, guru, dan lembaga pendidikan. Umpan balik ini dapat digunakan untuk perbaikan personal, perbaikan pengajaran, pengembangan profesional, dan peningkatan sistemik yang lebih luas.
4. Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti: Evaluasi pendidikan menyediakan informasi dan bukti yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pendidikan yang baik. Dengan mengumpulkan data dan informasi yang valid, lembaga pendidikan dapat membuat keputusan yang berdasarkan bukti, seperti perubahan kurikulum, pengembangan program, dan alokasi sumber daya yang efektif.
5. Peningkatan Akuntabilitas: Evaluasi pendidikan membantu dalam meningkatkan akuntabilitas di semua tingkatan sistem pendidikan. Dengan

mengukur dan mengevaluasi kinerja, hasil, dan dampak pendidikan, lembaga pendidikan bertanggung jawab secara publik atas kualitas pendidikan yang mereka berikan.

Melalui peran ini, evaluasi pendidikan dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Evaluasi yang efektif dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, memperbaiki strategi pembelajaran dan pengajaran, dan mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan hasil pendidikan.

4.4. Prinsip-Prinsip Evaluasi Pendidikan

Prinsip-prinsip Evaluasi Pendidikan merupakan panduan yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi secara efektif dan objektif. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip yang penting dalam evaluasi pendidikan:

1. Validitas: Evaluasi pendidikan harus valid, artinya instrumen dan metode evaluasi harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil evaluasi harus relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dapat memberikan informasi yang akurat tentang kemajuan peserta didik.

2. Reliabilitas: Evaluasi pendidikan harus reliabel, yaitu instrumen dan metode evaluasi harus menghasilkan hasil yang konsisten ketika digunakan secara berulang. Evaluasi yang reliabel akan memberikan hasil yang dapat diandalkan dan dapat diulang oleh pihak lain untuk memverifikasi temuan.
3. Objektivitas: Evaluasi pendidikan harus objektif, artinya evaluasi harus bebas dari bias dan pengaruh subyektivitas. Proses evaluasi harus adil dan tidak didasarkan pada preferensi pribadi atau pendapat individu. Evaluasi yang objektif akan memberikan hasil yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Transparansi: Evaluasi pendidikan harus transparan, sehingga semua pihak yang terkait dapat memahami proses dan kriteria evaluasi. Informasi tentang tujuan, metode, dan hasil evaluasi harus tersedia untuk semua pihak yang terlibat, termasuk peserta didik, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Konteks yang Relevan: Evaluasi pendidikan harus dilakukan dalam konteks yang relevan dengan situasi pendidikan yang sebenarnya. Evaluasi harus mempertimbangkan faktor-

faktor seperti budaya, konten pendidikan, karakteristik peserta didik, dan lingkungan belajar untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna.

6. Berkesinambungan: Evaluasi pendidikan harus berkesinambungan dan terintegrasi dalam proses pembelajaran. Evaluasi bukan hanya dilakukan sebagai kegiatan terpisah, tetapi juga diperhatikan secara terus-menerus untuk memantau kemajuan peserta didik dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.
7. Keberagaman Pendekatan: Evaluasi pendidikan harus menggunakan pendekatan yang beragam dan mencakup berbagai metode dan instrumen evaluasi. Pendekatan yang beragam memungkinkan pengumpulan data yang lebih lengkap dan komprehensif tentang pencapaian peserta didik serta efektivitas program dan pengajaran.

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam evaluasi pendidikan akan memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara obyektif, relevan, dan memberikan informasi yang akurat dan berguna untuk meningkatkan kualitas

pendidikan. Prinsip-prinsip ini juga membantu memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan integritas dan keadilan.

4.5. Jenis-Jenis Evaluasi Pendidikan

Ada beberapa jenis evaluasi pendidikan yang umum digunakan. Berikut adalah beberapa jenis evaluasi pendidikan yang penting:

1. **Evaluasi Formatif:** Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru tentang kemajuan belajar. Tujuannya adalah untuk memantau, mengidentifikasi, dan memperbaiki kelemahan atau kesulitan belajar. Evaluasi formatif biasanya dilakukan melalui penilaian kelas, tugas, ulangan harian, atau diskusi interaktif.
2. **Evaluasi Sumatif:** Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai pencapaian peserta didik secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang prestasi belajar peserta didik pada akhir program atau semester. Evaluasi sumatif sering

menggunakan tes akhir, ujian, atau proyek penilaian yang lebih besar.

3. **Evaluasi Diagnostik:** Evaluasi diagnostik dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai untuk mengumpulkan informasi tentang pengetahuan awal, keterampilan, atau kesulitan belajar peserta didik. Tujuannya adalah untuk membantu guru memahami kebutuhan individual peserta didik dan merancang pengajaran yang sesuai.
4. **Evaluasi Proses:** Evaluasi proses berfokus pada analisis dan penilaian kegiatan pembelajaran yang terjadi di kelas. Tujuannya adalah untuk memahami efektivitas metode pengajaran, interaksi guru-peserta didik, penggunaan sumber daya, dan atmosfer belajar. Evaluasi proses melibatkan observasi kelas, penilaian partisipasi, atau wawancara dengan peserta didik dan guru.
5. **Evaluasi Program:** Evaluasi program dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan dan efisiensi program pendidikan secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah program mencapai tujuan yang ditetapkan, apakah sumber daya digunakan secara optimal,

dan apakah ada perbaikan yang dapat dilakukan. Evaluasi program melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk penilaian peserta didik, wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

6. Evaluasi Responsif: Evaluasi responsif dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam merespons kebutuhan dan harapan peserta didik, orang tua, atau pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program pendidikan memenuhi kebutuhan peserta didik secara efektif dan memberikan dampak yang diharapkan.
7. Evaluasi Eksternal: Evaluasi eksternal dilakukan oleh pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah, badan akreditasi, atau peneliti independen, untuk mengevaluasi kualitas, efektivitas, atau kepatuhan suatu lembaga pendidikan terhadap standar atau kebijakan yang ditetapkan. Evaluasi eksternal sering melibatkan peninjauan dokumen, pengamatan kelas, atau wawancara dengan berbagai pihak terkait.

4.6. Metode Evaluasi Pendidikan

Ada beberapa metode evaluasi pendidikan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dalam proses evaluasi. Berikut adalah beberapa metode evaluasi pendidikan yang umum digunakan:

1. Tes atau Ujian: Metode ini melibatkan penggunaan instrumen tes atau ujian untuk mengukur pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kemampuan peserta didik dalam suatu bidang tertentu. Tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, atau tes praktik.
2. Observasi: Metode observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap kegiatan pembelajaran, interaksi guru dan peserta didik, serta lingkungan belajar. Observasi dapat dilakukan oleh guru, evaluator, atau rekan sejawat menggunakan daftar periksa, skala penilaian, atau rubrik yang telah ditentukan.
3. Wawancara: Metode wawancara melibatkan interaksi langsung antara evaluator dan peserta didik, guru, atau pihak terkait lainnya. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi kualitatif tentang persepsi, pandangan,

dan pengalaman individu terkait dengan pembelajaran dan pengajaran.

4. **Portofolio:** Metode portofolio melibatkan pengumpulan dan penilaian karya atau produk peserta didik selama proses pembelajaran. Portofolio dapat berupa kumpulan tugas, proyek, jurnal, atau karya seni yang mencerminkan kemajuan dan pencapaian peserta didik dalam berbagai aspek.
5. **Penilaian Peer:** Metode penilaian peer melibatkan penilaian oleh sesama peserta didik atau rekan sejawat. Peserta didik memberikan umpan balik dan penilaian terhadap karya atau penampilan sesama peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. **Penilaian Diri:** Metode penilaian diri melibatkan peserta didik dalam mengevaluasi dan merefleksikan kemajuan dan pencapaian mereka sendiri. Peserta didik mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan langkah perbaikan yang perlu diambil dalam proses pembelajaran.
7. **Analisis Dokumen:** Metode analisis dokumen melibatkan peninjauan dan analisis dokumen pendukung seperti rencana pembelajaran, catatan perkembangan, laporan evaluasi

sebelumnya, atau dokumen kebijakan sekolah. Analisis dokumen dapat memberikan informasi tambahan tentang pelaksanaan program dan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan.

8. Survei: Metode survei melibatkan penggunaan kuesioner atau instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dari peserta didik, guru, orang tua, atau pemangku kepentingan lainnya. Survei digunakan untuk mengukur persepsi, kepuasan, dan umpan balik terkait dengan berbagai aspek pendidikan.

4.7. Etika dalam Evaluasi Pendidikan

Etika dalam evaluasi pendidikan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa prinsip etika yang relevan dalam evaluasi pendidikan:

1. Keberimbangan dan Keadilan: Evaluasi pendidikan harus adil dan tidak memihak. Semua peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan pencapaian mereka. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, agama, atau faktor lain yang tidak relevan.

2. Kerahasiaan: Data dan informasi yang diperoleh dalam proses evaluasi pendidikan harus dijaga kerahasiaannya. Peserta didik, guru, dan pihak terkait lainnya harus merasa aman bahwa informasi pribadi mereka tidak akan disalahgunakan atau diungkapkan tanpa izin mereka.
3. Transparansi: Proses evaluasi pendidikan harus transparan dan terbuka. Peserta didik, guru, dan pihak terkait harus diberikan informasi yang jelas tentang tujuan evaluasi, metode yang digunakan, dan hasil yang diharapkan. Mereka juga harus memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dan melakukan klarifikasi jika diperlukan.
4. Kompetensi dan Integritas: Evaluasi pendidikan harus dilakukan oleh evaluator yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai. Evaluator harus menjaga integritas dan objektivitas dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data evaluasi. Mereka harus menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi.

5. Penggunaan yang Bertanggung Jawab: Hasil evaluasi pendidikan harus digunakan dengan bertanggung jawab. Informasi evaluasi harus digunakan untuk tujuan perbaikan dan pengembangan pendidikan, bukan untuk menghukum atau merugikan peserta didik atau guru. Keputusan berdasarkan hasil evaluasi harus adil dan seimbang.
6. Kestinambungan Evaluasi: Evaluasi pendidikan harus menjadi proses berkelanjutan yang memberikan umpan balik berkelanjutan dan peluang perbaikan. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir program atau semester, tetapi juga dalam tahap-tahap yang berbeda dalam proses pembelajaran.
7. Keterlibatan Stakeholder: Evaluasi pendidikan harus melibatkan peserta didik, guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya sebagai mitra dalam proses evaluasi. Pihak-pihak yang terlibat harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi dalam perencanaan dan implementasi evaluasi.

BAB V

MANAJEMEN PENDIDIKAN

5.1. Konsep Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*” artinya mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. Kata management berasal dari bahasa latin Perancis Kuno, yaitu *mano* yang berarti tangan, menjadi *manus* yang artinya bekerja berkali-kali menggunakan tangan, ditambah imbuhan *agere* yang berarti melakukan sesuatu, kemudian menjadi *managiare* artinya melakukan sesuatu berkali-kali menggunakan tangan (Ukas, 2004:1). Secara terminologis, kata manajemen dapat didefinisikan secara beragam oleh sejumlah ahli/pakar yakni:

Menurut Follet yang dikutip Wijayanti (2008:1), manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Selain itu Gulick yang dikutip oleh Wijayanti (2008:1) mengartikan manajemen adalah suatu bidang ilmu pengetahuan

(*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem yang lebih bermanfaat bagi manusia. Sedangkan Handoko (2012:8), mengatakan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya Hasibuan (2010:9), mengartikan manajemen sebagai ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya Terry yang dikutip oleh Nawai (2011:11). Menjelaskan manajemen merupakan tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan menggunakan tangan orang lain.

Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai profesi. Hal ini dimaksudkan bahwa manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional. Karakteristiknya yaitu profesional dalam membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, profesional dalam mencapai status mereka karena mendapatkan standar prestasi kerja tertentu,

dan profesional yang ditentukan oleh kode etik yang kuat (Schein, 2008:2). Robin dan Coulter (2010:12), menyatakan bahwa manajemen diperlukan oleh semua organisasi dan bersifat universal. Penerapan manajemen dapat dilakukan pada : 1) semua organisasi kecil dan besar, 2) semua tipe organisasi , *financial* dan *non financial*, 3) semua level organisasi, 4) semua area organisasi (manufaktur, pemasaran, SDM, dan lain sebagainya).

Berdasarkan pendapat beberapa pakar diatas, manajemen dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengatur, mengelola berbagai sumber serta menentukan dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) secara efektif dan efisien. Jadi manajemen merupakan sebuah kegiatan, dan pelaksanaanya disebut *manajing* dan pelakunya atau orang yang melakukan disebut manajer.

Fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Perencanaan adalah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Juga diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu model atau pola dari himpunan tindakan untuk masa yang akan datang. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur sumber mana yang diperlukan , termasuk sumber daya manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sehingga anggota kelompok memiliki keinginan untuk berusaha dan maju dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan bersama (Terry, 2010:9).

5.2. Konsep Pendidikan

Sedangkan pendidikan, menurut Mudayahardjo (2002:3), secara umum dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu secara luas-tidak terbatas dan sempit-

terbatas. Pengertian pendidikan secara luas adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Lebih lanjut dikatakan Mudyahardjo (2002:6) bahwa pengertian pendidikan secara sempit atau sederhana adalah persekolahan. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas sosial. Menurut Langeveld yang dikutip Usman(2014:13) mengatakan bahwa pendidikan adalah memanusiakan manusia. Bagi Ki Hajar Dewantara (dalam Usman, 2014:13) pendidikan dimaknai terutama di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Selain itu, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak. Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya, agar dapat

mandiri, akil-baliq, dan bertanggung jawab secara susila. Pendidikan adalah usaha mencapai penentuan diri, susila dan tanggung jawab.

Berdasarkan pengertian manajemen dan pendidikan tersebut, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen yang dipraktikan dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang ada dalam pendidikan. Menurut Mulyasa (2004:20), manajemen pendidikan adalah proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengawasan sebagai suatu proses untuk visi menjadi aksi. Selain itu, Usman (2014:13) mendefinisikan manajemen pendidikan merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan proses dan hasil belajar peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam mengembangkan potensi dirinya. Sementara itu Yamin (2009:19) mengartikan manajemen pendidikan sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan

pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Kemudian Sharma yang dikutip Usman (2014:14) mengatakan *"educational management is a field of study and practice concern with the operational of educational organization."* Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa manajemen pendidikan sebagai suatu bidang studi dan praktik yang menaruh perhatian pada pelaksanaan organisasi pendidikan.

Manajemen pendidikan adalah sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara (Depdiknas, 2007:6).

Dari berbagai pendapat pakar di atas dapat dikatakan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu proses pengelolaan pendidikan melalui kerjasama sekelompok orang dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut diperlukan fungsi-fungsi manajemen

pendidikan yang meliputi tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan proses pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang ditetapkan dapat tercapai. Manajemen juga dapat disebut sebagai pengelolaan sumber-sumber guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, karenanya manajemen ini memegang peranan yang sangat urgen dalam dunia pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan erat sekali dengan tujuan pendidikan secara umum, karena manajemen pendidikan pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Apabila dikaitkan dengan pengertian manajemen pendidikan pada hakekatnya merupakan alat mencapai tujuan. Adapun tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003:7). Adapun tujuan pokok mempelajari manajemen pendidikan adalah untuk memperoleh cara, tehnik, metode yang sebaik-baiknya dilakukan, sehingga sumber-sumber yang sangat terbatas seperti tenaga, dana, fasilitas, material maupun spiritual guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan-

tujuan dari manajemen pendidikan ditentukan berdasarkan penataan dan pengkajian terhadap situasi dan kondisi organisasi, seperti kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman (Depdiknas, 2001:4). Secara rinci tujuan manajemen pendidikan, yaitu: (1) terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM); (2) terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara; (3) tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien; (4) terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan; (5) teratasinya masalah mutu pendidikan.

5.3. Sumber Daya Manajemen Pendidikan

Sebagai sebuah sistem, aktivitas manajerial di sekolah dapat dikelompokkan ke dalam tiga domain, yakni; input, proses dan output. Ketiga tahapan ini merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, khususnya pada fase proses. Agar proses dapat berlangsung lancar, efektif dan efisien, maka ada beberapa unsur yang memainkan

peran, mendukung dan bahkan berpengaruh besar terhadap keberhasilan terselenggaranya proses dalam suatu organisasi khususnya dunia pendidikan. Unsur pendukung tersebut oleh para ahli disebut “sumber daya pendidikan” (*education resources*). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa “Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana, dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama”. Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada point 23 disebutkan bahwa “Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.”

Komariah dan Triatna (2006:11) menyebutkan bahwa sumber daya pendidikan terdiri dari lima unsur, yang terdiri: (1) manusia, (2) uang, (3) metode, (4) bahan-bahan, dan (5) mesin-mesin. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Terry (1964) bahwa 5 (lima) unsur sumber daya dalam manajemen meliputi: *“men, methods,*

money, materials, and machines.” Akan tetapi, oleh Ukas (1997) pendapat ini disempurnakan dengan menambahkan satu point lagi, yakni “pasar” (*market*). Dengan demikian, pengertian manajemen sumber daya pendidikan (MSDP) dalam arti luas dikelompokkan ke dalam enam aspek dan sering disingkat dengan istilah “6 M,” yaitu:

- a. *Men* (manusia; siswa, guru, tenaga dan unsur kependidikan lainnya); *Man* (manusia) atau Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur pertama yang menjadi bahan kajian MSDP berkaitan dengan kegiatan organisasi. Dalam perspektif MSDP, SDM mempunyai kedudukan yang sangat strategis, penting dan menentukan disebabkan manusialah yang mengatur segala sesuatunya dalam organisasi. Begitu urgennya posisi manusia, sehingga secanggih apapun alat-alat yang dimiliki suatu organisasi maka organisasi itu tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa diisi oleh SDM yang bermutu. Untuk mendapatkan SDM yang berkualitas sebagaimana dimaksud tersebut, maka satu-satunya cara adalah dengan pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan bagi manusia, karena sebagai anggota suatu

organisasi, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berhubungan dan bergaul dalam jaringan kerja atau bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari maka manusia harus mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Semakin tinggi “kompetensi” manusia terhadap ketiga faktor tersebut maka semakin “bermartabatlah” stratanya dalam suatu organisasi dan masyarakat. Untuk alasan itulah maka manusia harus dididik. Sesuai karakter manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang dapat didik (*creature educable*), atau lebih tegas lagi, manusia adalah makhluk yang harus dididik (*creature educandum*). Sumber daya manusia (SDM) atau *human resources* adalah penduduk yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasi. Dalam ilmu kependudukan, konsep ini dapat disejajarkan dengan konsep tenaga kerja (*manpower*) yang meliputi angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Sehubungan dengan hal itu, Aliminsyah dan Padji (2004) menyebutkan bahwa *manpower* adalah: (a) tenaga kerja yaitu karyawan-karyawan, baik majikan maupun

pekerja, baik pemberi maupun penerima pekerjaan; (b) tenaga kerja adalah angkatan kerja yang secara riil bekerja, setengah kerja, atau sedang mencari pekerjaan, yang menerima pekerjaan dengan mendapat gaji, upah atau laba sebagai imbalan; (c) tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- b. *Methods* (metode-metode; kurikulum); Menurut Komariah dan Triatna (2006), metode dalam pendidikan lebih dikhususkan pada metode pembelajaran, yaitu cara-cara, teknik-teknik dan strategi yang dikembangkan di sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan, hal ini diimplementasikan dalam bentuk kurikulum yang selalu berkembang dalam priode tertentu.
- c. *Materials* (bahan-bahan; sarana dan prasarana); Menurut Komariah dan Triatna (2006), sarana dan prasarana adalah barang-barang (*materials*) yaitu bahan-bahan fisik yang dipergunakan untuk mendukung PBM di sekolah guna membentuk siswa seutuhnya. Barang-barang tersebut berupa sarana dan prasarana, alat-alat

pendidikan, dan media pendidikan. Sarana umumnya disebut tanah (*site*), bangunan (*building*), dan perlengkapan (*equipment*).

- d. *Money* (uang atau dana); Gaffar (1987) mendefinisikan biaya adalah nilai besarnya dana yang diperkirakan perlu disediakan proyek itu dalam kegiatan tertentu. Sedangkan Zymelmen (1975) menyatakan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber saja, tetapi juga penggunaan biaya-biaya tersebut secara efektif dan efisien. Semakin efektif dan efisien sistem pendidikan yang dilaksanakan, maka akan efisien pula biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sehingga tujuan lebih maksimal dapat dicapai.
- e. *Machines* (mesin-mesin; teknologi pendidikan); Menurut Komariah dan Triatna (2006) adalah seperangkat alat yang mendukung terjadinya PBM, hal ini dapat berupa teknologi komputer, radio, televisi, mobil, atau media-media yang menggunakan teknologi. Alat-alat tersebut dipergunakan sekolah, baik sebagai sumber daya pendukung maupun objek pembelajaran.

- f. *Market* (pasar atau pemasaran). Pemasaran adalah upaya untuk memperkenalkan produk, baik produk dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa kepada konsumen, tetapi dalam dunia pendidikan pemasaran ini sering dilupakan, masalah ini dianggap kurang penting.

5.4. Sumber Daya Manusia dalam Manajemen Pendidikan

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) menjadi perhatian khusus pada banyak lembaga profesional, lembaga formal, maupun nonformal, bahkan di lembaga-lembaga sosial-non profit. Arti penting pengelolaan bidang sumber daya manusia itu dapat dilihat pada struktur kelembagaan pada lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta, misalnya badan kepegawaian nasional, bagian kepegawaian, bagian personalia, bagian ketenagaan, dan sebagainya. MSDM dalam pendidikan tidak luput dari kajian tentang perilaku manusia. Manusia berbuat untuk berkarya dan berprestasi melalui perilakunya. Ada perilaku baik yang lurus sesuai aturan, ada pula perilaku jelek yang menyimpang dari aturan. Dua dimensi perilaku manusia itu memiliki potensi yang sama, artinya manusia dapat cenderung berperilaku baik sekaligus dapat cenderung

berperilaku jelek. Manajemen pendidikan juga memberikan kajian tentang tiga tingkatan perilaku manusia, yaitu perilaku individu, perilaku kelompok, dan perilaku organisasi. Ketiga tingkatan perilaku itu dikelola agar manusia terarah pada situasi efisien dan efektif dalam bertindak. Upaya manajemen untuk mengelola perilaku manusia mendapat perhatian dalam ilmu pengetahuan, khususnya manajemen pendidikan.

SDM adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Sumbangan yang dimaksud adalah pemikiran dan pekerjaan yang mereka lakukan di berbagai kegiatan dalam perusahaan. Dalam pengertian sumber daya manusia, yang diliput bukanlah terbatas kepada tenaga ahli, tenaga pendidikan ataupun tenaga yang berpengalaman saja tetapi semua tenaga kerja yang digunakan perusahaan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya (Sukirno, 2006:172).

Mengingat bahwa pendidikan merupakan faktor yang amat penting dalam kehidupan manusia, maka proses pengembangan sumber daya manusia harus dilaksanakan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut

Kompri (dalam Nasri, 2014:70), SDM dalam manajemen pendidikan dapat diamati dalam dua aspek, yakni: kualitas dan kuantitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang kurang penting kontribusinya dalam membangun, dibandingkan dengan aspek kualitas. Bahkan kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental). Kualitas sumber daya manusia menyangkut dua aspek, yaitu: aspek fisik dan aspek non fisik yang menyangkut kemampuan kerja, berfikir dan keterampilan lain. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat diarahkan dalam dua aspek tersebut. Untuk meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program- program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan nonfisik tersebut, maka upaya pendidikan dan pelatihan adalah yang paling diperlukan. Dengan demikian peningkatan SDM Indoneisa dapat tercapai melalui pendidikan.

Hal senada juga dijelaskan oleh Mangkunegara (2001:56) bahwa SDM adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah

tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya. Potensi manusia menyangkut dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas. Karakteristik demografi merupakan aspek kuantitatif sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk dan komposisi penduduk.

Manajemen yang baik memerlukan tujuan dan manfaat yang baik pula, sebab tanpa ada tujuan yang jelas maka sebuah manajemen akan menjadi tidak terarah, selain itu juga tidak memiliki konsep yang jelas terhadap hal yang akan dituju. Kompri (dalam Nasri, 2014:170-173) menyebutkan sejumlah tujuan manajemen MSDM dalam pendidikan yaitu:

a. Tujuan masyarakat sebagai keseluruhan

Dalam bidang apapun suatu organisasi bergerak, dalam arti yang sebenar-benarnya untuk menghasilkan suatu “produk” dan “jasa: bagi kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Artinya, “produk” tersebut baik berupa barang atau jasa harus di interpretasikan dalam arti luas

dan tidak terbatas pada pengertian klasik, yaitu dalam arti barang atau jasa yang hanya dihasilkan oleh organisasi-organisasi yang bergerak di bidang perniagaan jasa. Dengan interpretasi yang demikian jelas terlihat bahwa tidak ada satu pun organisasi yang dapat mempertahankan eksistensinya dan melestarikan keberadaan tanpa mengkaitkan tujuan organisasi dengan tujuan masyarakat luas. Sudah barang tentu perhatian utama di tunjukkan kepada mereka yang menjadi "*Clientele Groups*" dari organisasi yang bersangkutan. Artinya, tidak ada organisasi yang dapat mempertahankan dan melanjutkan eksistensinya dalam keadaan terisolasi dan tanpa konteks. Berarti manajemen setiap organisasi harus memiliki kepekaan terhadap tuntutan social yang ditunjukkan kepada organisasi yang bersangkutan. Dengan perkataan lain setiap organisasi memiliki kewajiban social yang harus dipenuhinya. Bentuk nyata dari kegagalan suatu organisasi mengakibatkan pencapaian tujuan masyarakat luas terlihat dalam dua wujud. Pertama adalah masyarakat akan kehilangan kepercayaan

terhadap organisasi yang bersangkutan. Kedua, sebagai akibat hilangnya kepercayaan tersebut masyarakat tidak lagi memberikan dukungannya kepada kebijakan dan kegiatan organisasi tersebut. Jika suatu organisasi sudah kehilangan kepercayaan dan dukungan masyarakat, maka cepat atau lambat, tinggal menunggu kehancuran. Jadi menunaikan kewajiban sosial bagi suatu organisasi tidak semata-mata karena pertimbangan yang *altruistik*, meskipun pertimbangan itu penting, akan tetapi juga demi kepentingan organisasi yang bersangkutan tersebut.

b. Pencapaian tujuan organisasi

Manajemen sumber daya manusia yang baik ditujukan kepada peningkatan kontribusi yang dapat diberikan oleh para pekerja dalam organisasi kearah tercapainya tujuan organisasi. Tidak menjadi soal tujuan organisasional apa yang ingin dicapai. Dibentuknya satuan organisasi yang mengelola sumber daya manusia dimaksudkan bukan sebagai tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan. Kenyataan ini semakin

jelas terlihat apabila diingat bahwa satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dilakukan tugas-tugas penunjang, bukan melakukan tugas pokok. Artinya, memang benar bahwa satuan kerja tersebut, dengan nomenklatur apapun akan dikenal dalam memiliki tujuan-tujuan tertentu yang diusahakan terwujud melalui berbagai langkah yang ditempuh dalam penyelenggaraan fungsinya. Akan tetapi tujuan-tujuan departemental atau incremental tersebut harus dalam kerangka pemikiran utama yaitu mendukung berbagai kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh organisasi demi pencapaian berbagai tujuan dan sasaran.

c. Pencapaian tujuan fungsional

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja, baik yang berupa tugas pokok maupun tugas penunjang, dikenal dengan istilah “tugas fungsional.” Berarti yang dimaksud dengan pencapaian tujuan fungsional adalah keseluruhan langkah dan prosedur yang harus ditempuh oleh satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi demikian rupa sehingga sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi mampu

memberikan kontribusinya yang maksimal. Berbagai langkah dan prosedur tersebut biasanya terdiri dari perencanaan ketenagakerjaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengupahan dan penggajian, pembinaan karakter, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan hubungan kerja hingga pemberhentian, baik dalam bentuk pemutusan hubungan kerja maupun pemensiunan.

d. Pencapaian tujuan pribadi

Bekerja di berbagai suatu organisasi dengan memperoleh imbalan biasanya didasarkan keyakinan bahwa dengan bekerja pada organisasi atau perusahaan itu seseorang akan dapat memuaskan berbagai kebutuhannya, tidak hanya dibidang material, seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan kebendaan lainnya, akan tetapi juga sebagai kebutuhan lainya yang bersifat sosial, *prestise*, kebutuhan psikologi dan intelektual. Keanggotaan seseorang dalam berbagai organisasi sosial, seperti arisan, olah raga, klub dan sejenisnya, bukan sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan akan tetapi didorong oleh keinginan untuk memuaskan kebutuhan afiliasi secara optimal.

BAB VI

PENGEMBANGAN KURIKULUM

6.1. Prinsip dan Pendekatan Pengembangan Kurikulum

Prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum mengacu pada prinsip-prinsip dan pendekatan yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum yang efektif. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang prinsip-prinsip dan pendekatan yang umum digunakan dalam pengembangan kurikulum:

1. Prinsip Relevansi: Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan siswa serta mengakomodasi perubahan dalam masyarakat dan dunia kerja. Hal ini melibatkan identifikasi kompetensi yang relevan dan memperhatikan perkembangan teknologi dan tren saat ini.
2. Prinsip Keterpaduan: Kurikulum harus terpadu dan menyelaraskan semua komponen pembelajaran, termasuk tujuan, isi, metode, dan penilaian. Ini memastikan adanya hubungan

yang jelas antara komponen-komponen tersebut dan memungkinkan siswa untuk melihat keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu.

3. Prinsip Keseimbangan: Kurikulum harus seimbang dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini mencakup memperhatikan pembelajaran akademik, keterampilan sosial, kreativitas, dan nilai-nilai moral.
4. Prinsip Keterjangkauan: Kurikulum harus dapat diakses oleh semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kebutuhan khusus. Ini melibatkan pemberian kesempatan yang adil dan inklusif bagi semua siswa untuk mengakses kurikulum dan mencapai potensi mereka.
5. Pendekatan Berbasis Kompetensi: Pendekatan ini menekankan pengembangan kompetensi atau kemampuan yang relevan untuk menghadapi tuntutan dunia nyata. Kurikulum didesain untuk mengembangkan pemahaman mendalam, keterampilan praktis, dan sikap yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan karir.

6. Pendekatan Kontekstual: Pendekatan ini mempertimbangkan konteks lokal, budaya, dan sosial dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan kebutuhan masyarakat tempat kurikulum tersebut diimplementasikan.
7. Pendekatan Berbasis Masalah: Pendekatan ini menekankan pembelajaran yang terfokus pada pemecahan masalah nyata. Siswa diberikan tantangan atau masalah nyata yang membutuhkan pemikiran kritis, kolaborasi, dan keterampilan pemecahan masalah.
8. Pendekatan Berbasis Proyek: Pendekatan ini melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang melibatkan penelitian, desain, dan implementasi. Siswa terlibat secara aktif dalam proses belajar yang praktis dan relevan.

6.2. Analisis Kebutuhan Kurikulum

Analisis kebutuhan kurikulum merupakan proses pengumpulan dan penilaian informasi tentang kebutuhan siswa, komunitas, dan konteks pendidikan untuk merancang kurikulum yang relevan dan efektif. Tujuan dari analisis kebutuhan kurikulum adalah

memastikan bahwa kurikulum memenuhi kebutuhan siswa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam analisis kebutuhan kurikulum:

1. Mengumpulkan data siswa: Mengidentifikasi karakteristik siswa seperti latar belakang sosial, budaya, kebutuhan khusus, minat, dan kemampuan. Data ini dapat dikumpulkan melalui survei, observasi, wawancara, atau dokumen yang relevan.
2. Menyelidiki kebutuhan masyarakat: Menganalisis konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat tempat sekolah berada. Melakukan studi tentang perkembangan ekonomi, perubahan sosial, kebutuhan tenaga kerja, dan harapan masyarakat terhadap pendidikan.
3. Mengidentifikasi standar dan tuntutan kurikulum: Memahami standar nasional, regional, atau lokal yang mengatur kurikulum. Meninjau dokumen kebijakan pendidikan dan memahami tuntutan akademik dan keterampilan yang diharapkan dari siswa.
4. Menganalisis kekuatan dan kelemahan kurikulum yang ada: Mengevaluasi kurikulum

yang sedang berjalan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

5. Mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran: Menganalisis kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan data yang dikumpulkan. Mengidentifikasi area di mana siswa memerlukan peningkatan, tantangan yang perlu diatasi, dan keterampilan yang perlu dikembangkan.
6. Melibatkan pemangku kepentingan: Melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses analisis kebutuhan kurikulum. Mendengarkan pandangan dan masukan mereka tentang kebutuhan dan harapan terkait kurikulum.
7. Membuat rekomendasi perubahan: Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, membuat rekomendasi perubahan yang spesifik dan realistis dalam kurikulum. Menyusun rencana tindakan untuk mengimplementasikan perubahan tersebut.
8. Melakukan evaluasi berkelanjutan: Mengawasi implementasi perubahan dan terus melakukan evaluasi untuk memastikan keberhasilan dan keefektifan kurikulum yang baru.

6.3. Rancangan Kurikulum

Rancangan kurikulum adalah proses merancang struktur, isi, dan pengorganisasian pembelajaran dalam suatu program pendidikan. Rancangan kurikulum melibatkan pemilihan tujuan pembelajaran, pemilihan materi pelajaran, pengaturan urutan pembelajaran, serta penentuan metode dan strategi pengajaran yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam rancangan kurikulum:

1. Tujuan Pembelajaran: Merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh siswa dalam suatu kurikulum. Tujuan ini harus sesuai dengan kebutuhan siswa, tuntutan kurikulum nasional/regional, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Struktur Kurikulum: Menentukan struktur dan tingkat pendidikan yang tercakup dalam kurikulum, misalnya tingkat pendidikan dasar, menengah, atau tinggi. Merancang kerangka kurikulum yang mencakup mata pelajaran utama, mata pelajaran pilihan, dan kegiatan ekstrakurikuler.
3. Konten Kurikulum: Memilih dan mengorganisasikan materi pelajaran yang relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Konten kurikulum harus mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan untuk dikembangkan oleh siswa.

4. Metode Pembelajaran: Memilih metode dan strategi pengajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran dapat mencakup ceramah, diskusi kelompok, simulasi, praktik lapangan, atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
5. Penilaian Pembelajaran: Menentukan metode dan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian dapat melibatkan tes tertulis, tugas proyek, penilaian kinerja, atau portofolio siswa.
6. Integrasi Nilai dan Etika: Memasukkan nilai-nilai dan etika dalam rancangan kurikulum untuk membentuk sikap dan perilaku yang positif pada siswa. Ini dapat mencakup pengembangan keterampilan sosial, moral, etika, dan kepemimpinan.
7. Fleksibilitas: Memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam kurikulum untuk mengakomodasi perbedaan individu, minat, dan kebutuhan siswa. Kurikulum juga perlu dapat

beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tuntutan global.

8. Evaluasi dan Perbaikan: Merancang sistem evaluasi dan pengawasan berkala untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kurikulum. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum lebih lanjut.

6.4. Pengembangan Materi Pembelajaran

Pengembangan materi pembelajaran merupakan proses merancang, mengembangkan, dan menyusun materi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran tersebut dapat berupa buku teks, modul, panduan pengajaran, presentasi, media pembelajaran, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa prinsip dan langkah dalam pengembangan materi pembelajaran:

1. Mengidentifikasi Tujuan Pembelajaran: Menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui materi pembelajaran tersebut. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan relevan dengan konteks pembelajaran.
2. Menganalisis Kebutuhan dan Karakteristik Peserta Didik: Memahami kebutuhan,

karakteristik, kemampuan, dan latar belakang peserta didik untuk mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan mereka.

3. Memilih Konten yang Relevan: Memilih dan mengorganisasikan konten pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Konten tersebut harus relevan, akurat, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
4. Menentukan Struktur dan Pengorganisasian Materi: Menentukan cara pengorganisasian materi pembelajaran yang logis dan mudah dipahami oleh peserta didik. Mengatur materi menjadi bagian-bagian yang terstruktur dan mengatur urutan pembelajaran yang tepat.
5. Menyesuaikan Gaya Pembelajaran: Memperhatikan variasi gaya pembelajaran peserta didik, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Menyediakan beragam kegiatan dan sumber daya pembelajaran untuk mendukung berbagai gaya pembelajaran.
6. Memilih Metode dan Strategi Pembelajaran: Memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Metode tersebut dapat meliputi ceramah, diskusi, simulasi,

praktik, penugasan, atau penggunaan teknologi pembelajaran.

7. Mengembangkan Materi Pembelajaran yang Interaktif: Mengembangkan materi pembelajaran yang melibatkan interaksi aktif peserta didik. Menggunakan teknologi, media, dan sumber daya pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi peserta didik.
8. Mengevaluasi dan Mengembangkan Materi Pembelajaran: Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap materi pembelajaran yang telah dikembangkan. Mengumpulkan umpan balik dari peserta didik dan guru untuk melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

6.5. Pengembangan Evaluasi Pembelajaran

Pengembangan evaluasi pembelajaran merupakan proses merancang dan mengembangkan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran penting untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik bagi pengembangan

pembelajaran di masa depan. Berikut adalah beberapa langkah dalam pengembangan evaluasi pembelajaran:

1. Menentukan Tujuan Evaluasi: Menentukan tujuan evaluasi yang spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi harus berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dari peserta didik.
2. Memilih Bentuk Evaluasi: Memilih bentuk evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan jenis materi yang dievaluasi. Bentuk evaluasi dapat berupa tes tertulis, tugas proyek, penilaian kinerja, observasi, atau wawancara.
3. Mengembangkan Instrumen Evaluasi: Mengembangkan instrumen evaluasi yang sesuai dengan tujuan evaluasi. Instrumen evaluasi harus dapat mengukur dengan jelas dan obyektif tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Instrumen evaluasi dapat berupa soal tes, rubrik penilaian, daftar observasi, atau formulir penilaian.
4. Menentukan Skala Penilaian: Menentukan skala penilaian yang akan digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Skala

penilaian dapat berupa angka, huruf, kategori, atau deskripsi tingkat pencapaian.

5. **Menguji Validitas dan Reliabilitas:** Melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen evaluasi yang telah dikembangkan. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengacu pada konsistensi dan ketepatan hasil evaluasi.
6. **Mengatur Prosedur Evaluasi:** Mengatur prosedur evaluasi, termasuk waktu, tempat, dan kondisi pelaksanaan evaluasi. Juga penting untuk menyediakan petunjuk yang jelas kepada peserta didik tentang tugas evaluasi yang akan dilakukan.
7. **Melaksanakan Evaluasi:** Melakukan evaluasi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Memberikan arahan yang jelas kepada peserta didik tentang tugas evaluasi dan memberikan bimbingan jika diperlukan.
8. **Menganalisis Hasil Evaluasi:** Menganalisis hasil evaluasi untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Menginterpretasikan dan menggambarkan hasil evaluasi dengan

menggunakan skala penilaian yang telah ditentukan.

9. Memberikan Umpan Balik: Memberikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil evaluasi. Umpan balik harus bersifat konstruktif, jelas, dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran di masa depan.
10. Melakukan Perbaikan: Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di masa depan. Merancang strategi pengembangan pembelajaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan peserta didik.

6.6. Implementasi kurikulum

Implementasi kurikulum adalah proses penerapan kurikulum yang telah dirancang ke dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Hal ini melibatkan sejumlah langkah dan tindakan untuk menjalankan rencana kurikulum secara efektif. Berikut adalah beberapa langkah dalam implementasi kurikulum:

1. Persiapan Guru: Guru harus memahami dengan baik isi kurikulum dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mereka perlu mempersiapkan

materi pelajaran, strategi pengajaran, dan sumber daya yang diperlukan.

2. **Penjadwalan Pembelajaran:** Menjadwalkan waktu pembelajaran untuk setiap komponen kurikulum, termasuk topik pembelajaran, kegiatan, dan evaluasi. Penjadwalan yang baik memastikan bahwa semua aspek kurikulum dapat ditutupi dalam waktu yang tersedia.
3. **Pemilihan Metode Pengajaran:** Memilih metode pengajaran yang sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Metode pengajaran dapat bervariasi, seperti ceramah, diskusi, tugas kelompok, atau proyek.
4. **Penggunaan Sumber Belajar:** Memilih dan menggunakan sumber belajar yang relevan dan sesuai dengan kurikulum. Sumber belajar dapat berupa buku teks, materi audiovisual, perangkat lunak, atau sumber daya daring.
5. **Pembelajaran Kolaboratif:** Mendorong pembelajaran kolaboratif di antara peserta didik. Hal ini melibatkan kerja kelompok, diskusi, dan kegiatan berbasis proyek yang melibatkan interaksi dan kerjasama antara peserta didik.
6. **Evaluasi Pembelajaran:** Melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengukur pencapaian

tujuan pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes, tugas, proyek, atau penilaian kinerja.

7. Pemantauan dan Evaluasi Proses: Memantau dan mengevaluasi proses implementasi kurikulum secara berkala. Hal ini melibatkan refleksi, analisis data, dan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
8. Keterlibatan Stakeholder: Melibatkan semua stakeholder yang terkait, seperti guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat, dalam proses implementasi kurikulum. Keterlibatan mereka dapat memberikan dukungan, umpan balik, dan masukan yang berharga.
9. Pengembangan Profesional Guru: Memberikan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengimplementasikan kurikulum. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan internal, kerjasama antar guru, atau program pengembangan profesional eksternal.
10. Evaluasi dan Pembaruan Kurikulum: Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perubahan lingkungan. Jika diperlukan, kurikulum dapat diperbarui dan disesuaikan agar tetap relevan.

6.7. Monitoring dan Evaluasi kurikulum

Monitoring dan evaluasi kurikulum merupakan proses penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kurikulum dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut adalah penjelasan mengenai monitoring dan evaluasi kurikulum:

1. Monitoring Kurikulum:

- Monitoring kurikulum melibatkan pemantauan terhadap proses dan pelaksanaan kurikulum di dalam kelas.
- Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kurikulum dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
- Monitoring dilakukan secara kontinu dan berkala dengan menggunakan berbagai instrumen dan teknik pengumpulan data, seperti observasi kelas, wawancara, atau penilaian formatif.

2. Evaluasi Kurikulum:

- Evaluasi kurikulum bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran.

- Evaluasi dapat dilakukan pada level individu, kelas, sekolah, atau sistem pendidikan.
 - Evaluasi melibatkan analisis data yang terkumpul, baik dari hasil tes, tugas, atau penilaian kinerja.
 - Hasil evaluasi digunakan untuk membuat perbaikan dan penyesuaian dalam kurikulum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
3. Indikator Monitoring dan Evaluasi:
- Indikator monitoring dan evaluasi harus jelas dan relevan dengan tujuan kurikulum.
 - Indikator dapat meliputi pencapaian akademik, kompetensi siswa, partisipasi siswa, keterlibatan orang tua, atau kepuasan peserta didik.
 - Indikator juga dapat mencakup aspek lain seperti peningkatan motivasi siswa, penggunaan teknologi, atau pengembangan keterampilan sosial.
4. Penggunaan Hasil Monitoring dan Evaluasi:
- Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk membuat keputusan dan perbaikan dalam kurikulum.

- Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk merancang intervensi, melengkapi kebutuhan siswa, atau meningkatkan metode pengajaran.
- Hasil monitoring dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembaruan dan penyempurnaan kurikulum secara keseluruhan.

BAB VIII

MEDIA PEMBELAJARAN

7.1. Konsep Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi di bidang pendidikan yang menuntut efisiensi dan efektifitas dalam pembelajaran. Untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang optimal, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengurangi bahkan menghilangkan dominasi sistem penyampaian verbalistik dengan menggunakan media pembelajaran.

Ada dua alasan mengapa media pembelajaran digunakan, pertama karena tuntutan, sehingga hal-hal yang perlu dipelajari juga semakin rumit dan dampaknya proses pembelajaran pun menjadi semakin rumit. Di sini media dapat membantu menyederhanakan konsep-konsep yang kompleks sehingga dapat dicerna dengan mudah. Kedua, saat ini ketersediaan media (supply) semakin beragam, sebagai akibat dari kemajuan teknologi di segala bidang

Menurut Sawiyanto (2011) daya serap indra manusia berbeda-beda kekuatannya. Masing-masing panca indera manusia memiliki karakteristik tersendiri dalam penyerapan belajar. Ilmuwan pedagogi dan pendidikan di Inggris melakukan survei tentang efisiensi pembelajaran berbagai metode pengajaran. Berikut adalah kerucut pengalaman belajar yang dapat membedakan daya serap siswa terhadap objek pengetahuan tertentu.



Gambar 1. Kerucut Pengalaman Belajar Edgar Dale

Dari kerucut pengalaman belajar di atas diketahui bahwa siswa akan mencapai hasil belajar 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa media yang akan digunakan dengan metode pengajaran

yang tepat dimana siswa banyak melakukan akan membuat daya serap siswa lebih tinggi.

Penggunaan media pembelajaran tidak harus dilihat atau dinilai dari segi kecanggihan media, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya dalam membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Hamalik (Arsyad, 2004) mengemukakan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat menimbulkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh psikologis bagi siswa.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai penggunaan media pembelajaran, mari kita sepakati dahulu tentang pengertian dan perbedaan antara media pembelajaran dengan alat peraga dan sumber belajar

7.1.1. Alat Peraga

Dulu, banyak orang yang menggunakan istilah alat peraga. Peraga berasal dari kata “raga” yang berarti jasad atau wujud, yaitu dengan menunjukkan secara langsung atau memperagakan. Kemudian muncullah alat peraga, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan wujud atau bentuk dari sesuatu yang diajarkan. Istilah alat peraga masih banyak digunakan dalam jangka

waktu yang lama oleh para guru saat ini. Bahkan berkembang silih berganti dengan nama-nama istilah lain seperti alat bantu, alat pembelajaran, dan lain-lain. Istilah yang dikemukakan ini tidak berarti bahwa penggunaan alat peraga dianggap salah atau konvensional. Alat peraga dalam pembelajaran pada hakikatnya adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang nyata sehingga dapat memperjelas materi yang disampaikan kepada siswa. Kesimpulannya, alat peraga adalah semua benda dan fasilitas yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran guna memperjelas dan memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran.

Saat ini banyak orang yang membedakan antara istilah alat peraga dan media pembelajaran, namun banyak juga yang menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian untuk merujuk pada alat atau benda yang sama. Sebenarnya perbedaan kedua istilah tersebut hanya pada fungsinya saja, bukan pada substansi atau objeknya sendiri. Sesuatu disebut alat peraga jika fungsinya hanya sebagai alat, dan disebut media pembelajaran jika merupakan bagian integral dari semua kegiatan pembelajaran, serta adanya

pembagian tanggung jawab antara guru dan media pembelajaran. Misalnya pada materi pelajaran bahasa Inggris tentang perkenalan diri, guru dapat menggunakan media pembelajaran audio dengan cara memperdengarkan seseorang memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris dan audio tersebut dapat diunduh dari internet. Siswa diminta untuk mendengarkan pemutaran audio pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dan hanya diperlukan saat memberikan penjelasan tentang isi monolog yang belum dipahami siswa.

Alat peraga yang baik adalah bentuknya yang sederhana, mudah digunakan, mudah disimpan, dapat memudahkan pembelajaran, dapat digunakan pada beberapa mata pelajaran, tahan lama dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan alat peraga yang bersangkutan. Berikut adalah contoh alat peraga yang digunakan guru untuk pembelajaran Biologi.



Gambar 2. Alat Peraga Anatomi Tubuh

7.1.2. Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima dalam suatu proses komunikasi yang terus menerus (Smaldino, Russel, Heinich, & Molenda, 2008). Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan, dapat merangsang pemikiran dari kegiatan, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada siswa (Ekayani, 2017).

Media pembelajaran merupakan bagian integral dari pembelajaran di sekolah. Pemanfaatan media pembelajaran merupakan upaya kreatif dan sistematis untuk menciptakan pengalaman yang dapat membantu proses belajar siswa. Hal ini dikarenakan media berperan sebagai pemicu belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar agar tidak mudah bosan mengikuti proses belajar mengajar. Meski begitu, perlu diperhatikan bahwa pemilihan media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai.

Seiring dengan kemajuan teknologi, muncul berbagai peralatan elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Kemajuan tersebut juga mempengaruhi bidang pendidikan dan pembelajaran, dengan pemanfaatan berbagai alat yang dapat membantu kegiatan pembelajaran. Sekitar pertengahan abad ke-20, upaya pemanfaatan visual dilengkapi dengan penggunaan alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audio visual. Dikenal dengan audio visual aids (AVA) yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang membantu pendengaran dan penglihatan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media pembelajaran semakin meluas dan interaktif, seperti radio, video, komputer dan internet, yang semuanya diharapkan dapat membantu. penglihatan dan pendengaran siswa. sehingga pembelajaran dapat dipahami dengan lebih jelas dan menarik. Dalam hal ini, istilah alat muncul. Istilah ini masih digunakan dalam berbagai kesempatan, bahkan digunakan secara silih berganti dengan media pembelajaran atau alat peraga. Penggunaan istilah itupun tidak

salah, yang perlu diperhatikan adalah fungsi dan tujuan penggunaannya dalam pembelajaran.



Gambar 3. Macam-Macam Media Pembelajaran
Era Revolusi 4.0



Gambar 4. Salah Satu ontoh Media Pembelajaran
Kreatif Guru

7.1.3. Sumber belajar

Sumber-sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat di pergunakan sebagai tepat dimana bahan pengajaran terhadap atau asal untuk

belajar seseorang. Dengan demikian, sumber belajar merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi peserta didik.

The Association of Educational Communication Technology (AECT) mendefinisikan bahwa sumber belajar adalah semua sumber yang berupa data, orang atau benda yang dapat digunakan untuk memberikan kemudahan (kenyamanan) belajar bagi siswa. Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh suatu informasi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian sumber belajar adalah segala sesuatu yang dirancang atau menurut sifatnya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam belajar. *The Association for Educational Communications and Technology* (AECT) yang dikutip Bambang (2008) juga mendefinisikan hal yang sama mengenai sumber belajar sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran, seperti (pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar belakang).

Dilihat dari jenis atau asalnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *resource by design* (sumber belajar yang dirancang khusus) dan *resource by utilization* (sumber belajar yang digunakan). Sumber belajar yang sengaja dirancang secara khusus berarti sumber belajar yang sengaja direncanakan dan dibuat untuk tujuan pembelajaran, sedangkan sumber belajar yang digunakan adalah segala sesuatu yang sudah ada di sekitar kita yang dapat digunakan untuk belajar.

Ada beberapa sumber belajar menurut AECT (Kristanto, 2016), yaitu:

- 1) Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komponen lain (manusia, alat, bahan), dapat berbentuk ide, fakta, makna, dan data.
- 2) Orang adalah mereka yang bertindak sebagai penyimpan, dan atau menyalurkan pesan.
- 3) Bahan adalah barang-barang (lazim disebut dengan perangkat lunak “software”) yang biasanya berisikan pesan yang disajikan dengan peralatan, kadang bahan itu sendiri sudah merupakan bentuk penyajian.
- 4) Peralatan adalah barang-barang (lazim disebut perangkat keras “hardware”) digunakan untuk

menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan.

- 5) Teknik adalah prosedur/langkah-langkah tertentu dalam menggunakan bahan, alat, latar, dan manusia dalam kerangka penyampaian pesan.
- 6) Latar/Setting adalah lingkungan dimana pesan itu diterima peserta didik

Jadi, banyak sekali sumber belajar di sekitar kita, yang semuanya bisa kita manfaatkan untuk keperluan belajar. Sekali lagi, guru hanyalah salah satu dari sekian banyak sumber belajar yang ada. Bahkan guru adalah satu-satunya sumber belajar berupa manusia, selain pustakawan, tenaga laboratorium, tokoh masyarakat, tenaga ahli, tokoh agama, dll. Karena setiap anak adalah individu yang unik (berbeda satu sama lain), sedapat mungkin guru memberikan perlakuan sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa. Diharapkan kegiatan mengajar benar-benar menghasilkan kegiatan belajar bagi setiap siswa. Hal ini dapat dilakukan jika guru berusaha menggunakan berbagai sumber belajar.



Gambar 5. Berbagai Macam Sumber Belajar

7.2. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran

Sebagaimana dinyatakan oleh Kemp dan Dayton dalam Arsyad (2013), tujuan media pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku, yang berarti lebih sedikit penafsiran tentang materi.
- b. Pembelajaran dapat menjadi lebih menarik, siswa dapat menjadi lebih tertarik dengan media, dan siswa dapat tetap fokus.
- c. Pembelajaran yang lebih interaktif akan mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif di kelas.
- c. Waktu belajar dapat dikurangi.
- f. Sinergi dan integrasi antara materi dan media yang akan disampaikan dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran.
- f. Pembelajaran dapat diberikan kapan saja, terutama jika media dapat digunakan secara individu.

- g. Persepsi siswa tentang proses pembelajaran dan materi pelajaran dapat ditingkatkan.
- h. Fungsi guru dapat berubah ke arah yang lebih baik; beban guru dapat dikurangi, dan kemungkinan mengulangi penjelasan yang sama dapat dikurangi.

Menurut Kemp & Dayton dalam Arsyad (2013), media pembelajaran dapat melakukan tiga fungsi utama: memicu minat atau tindakan, menyajikan informasi, dan memberi instruksi. Sudjana dan Rifai dalam Arsyad (2013) menambahkan fungsi media, yaitu:

- a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, yang dapat meningkatkan keinginan mereka untuk belajar.
- b. Bahan pengajaran akan lebih jelas sehingga siswa dapat memahaminya dan mencapai tujuan pengajaran.
- c. Metode mengajar akan lebih beragam dan tidak bergantung pada komunikasi lisan.
- d. Dengan menggunakan media, cara mengajar akan berbeda dan disesuaikan dengan materi ajar.
- e. Selama belajar, siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengamati, mendemonstrasikan, melakukan langsung, dan memerankan.

Dari pendapat di atas, media pembelajaran sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran karena membantu mengatasi kejenuhan siswa dan lebih menarik perhatian siswa di kelas dalam mengikuti pembelajaran.

7.3. Jenis dan Karakteristik Media Pembelajaran

Sanjaya (2013) menyatakan bahwa media pembelajaran dapat dibagi menjadi berbagai kategori berdasarkan perspektif individu.

- a. Media dapat dibagi ke dalam kategori berikut berdasarkan karakteristiknya:
 - Media auditif, atau media yang hanya dapat didengar, seperti radio dan rekaman suara
 - Media visual, atau media yang hanya dapat dilihat, tidak memiliki suara. Media ini termasuk film slide, photo, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai jenis bahan cetak, termasuk media grafis.
 - Media audiovisual adalah jenis media yang selain suara juga mengandung gambar yang dapat dilihat. Contohnya termasuk slide suara, berbagai ukuran film, rekaman video, dan lainnya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan menarik karena

menggabungkan elemen dari kedua jenis media.

b. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dibagi ke dalam:

- Media yang menyampaikan informasi secara bersamaan, seperti radio dan televisi
Media ini memungkinkan siswa belajar secara bersamaan tentang berbagai topik.
- Media seperti film slide, film, video, dan lainnya yang memiliki batas waktu dan ruang.

c. Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dibagi ke dalam:

- Media yang diproyeksikan: transparansi, film, slide, film strip, dll. Alat proyeksi khusus diperlukan untuk media jenis ini, seperti film projector untuk menampilkan film, slide projector untuk menampilkan sisi film, dan Over Head Projector (OHP) untuk menampilkan transparansi.
- Sumber daya non-proyeksi, seperti radio, gambar, picture, lukisan, dan lainnya
Pilihan media yang disesuaikan dengan tujuan, materi, dan kemampuan pembelajaran akan sangat membantu

proses dan hasil pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien.

7.4. Teknik Pemilihan Media Pembelajaran

Dalam hal penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran, pendidik dan guru harus berhati-hati dalam memilih dan menetapkan media yang akan digunakan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukannya akan lebih efektif jika media dipilih dengan cermat dan tepat. Sebagian kecil dari berbagai jenis media pembelajaran tidak akan digunakan secara bersamaan dalam kegiatan pembelajaran. Pemilihan media yang cermat harus dilakukan untuk mencapai hal ini.

Sanjaya (2013) menyatakan beberapa prinsip penggunaan media pembelajaran yaitu:

- a. Media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- b. Media pembelajaran harus sesuai dengan materi pelajaran
- c. Media pembelajaran sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kondisi siswa
- d. Media yang digunakan harus dievaluasi untuk efisiensi dan efektivitas.

- b. Media pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan guru dalam menggunakannya secara teknis.

Prinsip-prinsip ini tidak mewajibkan guru harus memiliki keahlian yang berbeda untuk mengembangkan media. Sekurang-kurangnya, prinsip penggunaan media pembelajaran mencakup komponen berikut: tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, siswa, dan guru. Suatu media sudah layak untuk digunakan jika syarat-syarat tersebut dipenuhi.

BAB VIII

PENDIDIKAN KARAKTER

8.1. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter adalah suatu pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengembangan nilai-nilai moral, sikap positif, dan perilaku yang baik pada peserta didik. Tujuan utama dari pendidikan karakter adalah membentuk individu yang memiliki integritas, empati, tanggung jawab, dan kemampuan untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain.

Pendidikan karakter bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami nilai-nilai moral, memperkuat kesadaran diri, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan menginternalisasi sikap dan perilaku yang baik. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, memiliki etika yang baik, dan mampu mengambil keputusan yang benar dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan akademik,

tetapi juga pada pengembangan sikap, moral, dan etika yang baik. Hal ini dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang menyeluruh, melibatkan lingkungan pembelajaran yang positif, serta melibatkan peran guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan.

Pentingnya pendidikan karakter terletak pada peran pentingnya dalam membentuk kepribadian dan karakter peserta didik. Pendidikan karakter membantu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi berbagai situasi dan tantangan dalam kehidupan, serta membantu mereka mengembangkan moralitas, empati, dan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.

Pendidikan karakter juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, di mana nilai-nilai moral dan sikap positif menjadi dasar dalam interaksi antar individu. Selain itu, pendidikan karakter dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial, seperti bullying, kekerasan, dan perilaku negatif lainnya.

Dalam mengimplementasikan pendidikan karakter, diperlukan kerjasama yang baik antara pihak sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Semua pihak harus terlibat dalam membentuk lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan karakter yang baik pada peserta didik.

8.2. Keberlanjutan dan Pengembangan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter tidak hanya sekadar menjadi program yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga harus memiliki pendekatan yang berkelanjutan dan terus-menerus dalam pengembangan karakter peserta didik. Keberlanjutan dalam pendidikan karakter berarti memastikan bahwa pembentukan nilai-nilai moral dan sikap positif tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembelajaran sehari-hari di sekolah dan lingkungan sosial peserta didik.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam keberlanjutan dan pengembangan pendidikan karakter:

1. **Integrasi dalam Kurikulum:** Pendidikan karakter perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan menyisipkan pembelajaran tentang nilai-nilai moral dan sikap positif dalam berbagai mata pelajaran, aktivitas ekstrakurikuler, dan pengalaman belajar di luar kelas.
2. **Pelibatan Seluruh Komunitas Pendidikan:** Keberlanjutan pendidikan karakter membutuhkan kolaborasi dan partisipasi semua

pihak terkait, termasuk guru, staf sekolah, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Semua pihak harus memiliki kesadaran dan komitmen yang sama terhadap pengembangan karakter peserta didik.

3. **Pembinaan Guru:** Guru memiliki peran kunci dalam mengimplementasikan pendidikan karakter. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan guru dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan pendidikan karakter sangat penting. Guru perlu dilengkapi dengan strategi pembelajaran yang efektif, sumber daya yang relevan, dan pendekatan pedagogis yang sesuai.
4. **Peningkatan Kesadaran Diri dan Refleksi:** Penting bagi peserta didik untuk memiliki kesadaran diri tentang nilai-nilai dan sikap mereka sendiri. Pembelajaran tentang karakter harus mendorong peserta didik untuk merenung, mempertanyakan, dan mempertimbangkan tindakan mereka dalam konteks nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan refleksi, diskusi, dan praktik berpikir kritis.

5. Lingkungan Pembelajaran yang Mendukung: Lingkungan sekolah dan masyarakat juga berperan penting dalam pendidikan karakter. Lingkungan yang mendukung, seperti budaya sekolah yang positif, norma sosial yang baik, dan pemodelan perilaku yang tepat, akan memperkuat nilai-nilai moral dan sikap positif yang diajarkan.
6. Evaluasi dan Pemantauan: Keberlanjutan pendidikan karakter membutuhkan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Melalui proses evaluasi, dapat ditemukan kelemahan dan kekuatan dalam implementasi program pendidikan karakter, serta dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.

Pengembangan pendidikan karakter tidak hanya bermanfaat bagi individu secara pribadi, tetapi juga memiliki dampak yang positif dalam masyarakat secara keseluruhan. Peserta didik yang memiliki karakter yang kuat akan menjadi individu yang bertanggung jawab, memiliki etika kerja yang baik, dan mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

8.3. Perbandingan Pendidikan Karakter di Berbagai Negara

Pendidikan karakter merupakan isu global yang diperhatikan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Meskipun setiap negara memiliki pendekatan dan program pendidikan karakter yang berbeda, tujuannya tetap sama, yaitu membentuk individu yang memiliki nilai-nilai moral, sikap positif, dan keterampilan sosial yang baik. Berikut adalah beberapa contoh perbandingan pendidikan karakter di beberapa negara:

1. Amerika Serikat: Di Amerika Serikat, pendidikan karakter sering kali diimplementasikan melalui program-program tambahan yang disebut "Character Education". Program-program ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat kepada siswa. Pendidikan karakter di Amerika Serikat biasanya dilakukan melalui kegiatan khusus, pengajaran langsung, dan kehidupan sehari-hari di sekolah.
2. Jepang: Di Jepang, pendidikan karakter dikenal dengan sebutan "moral education" atau "kokoro-no-kyoiku". Pendidikan karakter di Jepang bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki sifat disiplin, hormat, kerjasama, dan

rasa tanggung jawab. Pendidikan karakter di Jepang sering kali dilakukan melalui pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, serta upacara dan ritual yang mengajarkan nilai-nilai moral.

3. Singapura: Di Singapura, pendidikan karakter dikenal dengan sebutan "values education". Pendidikan karakter di Singapura fokus pada pengembangan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin. Pendidikan karakter di Singapura terintegrasi dalam kurikulum sekolah dan dilakukan melalui pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, serta pengalaman belajar di luar kelas.
4. Swedia: Di Swedia, pendidikan karakter dikenal dengan sebutan "value-based education". Pendidikan karakter di Swedia bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki nilai-nilai demokrasi, persamaan, toleransi, dan keadilan. Pendidikan karakter di Swedia diterapkan melalui pendekatan inklusif, di mana siswa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang mempromosikan nilai-nilai tersebut.

8.4. Tantangan dan Hambatan dalam Pendidikan Karakter

Tantangan dan hambatan dalam pendidikan karakter dapat bervariasi di setiap konteks dan masyarakat. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang sering dihadapi dalam pendidikan karakter:

1. **Kompleksitas Nilai:** Pendidikan karakter melibatkan pengajaran dan pengembangan berbagai nilai dan sikap yang kompleks. Menyatukan perspektif yang beragam dari berbagai kelompok dan budaya dapat menjadi tantangan, karena setiap individu memiliki pandangan dan nilai-nilai yang berbeda-beda.
2. **Kurikulum Terbatas:** Seringkali, pendidikan karakter dianggap sebagai bagian sekunder atau tambahan dalam kurikulum pendidikan. Kurangnya waktu, sumber daya, dan perhatian terhadap pendidikan karakter dapat menghambat implementasi yang efektif.
3. **Pelatihan Guru:** Guru memainkan peran kunci dalam pendidikan karakter, tetapi mereka mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam memfasilitasi pengembangan karakter siswa. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam pendidikan karakter

dapat menjadi hambatan dalam menghadapi tantangan ini.

4. Pengukuran dan Evaluasi: Mengukur pencapaian dalam pendidikan karakter dapat menjadi tantangan. Karakteristik seperti empati, etika, dan tanggung jawab sulit diukur secara objektif. Oleh karena itu, pengembangan metode evaluasi yang relevan dan valid menjadi penting namun rumit.
5. Lingkungan Eksternal: Pengaruh lingkungan di luar sekolah juga dapat mempengaruhi pendidikan karakter. Faktor-faktor seperti media massa, teman sebaya, dan lingkungan keluarga dapat memiliki dampak yang signifikan pada pembentukan karakter siswa. Menavigasi dan mengatasi pengaruh negatif ini dapat menjadi tantangan.
6. Konsistensi dan Keberlanjutan: Pendidikan karakter bukanlah proses yang satu kali dilakukan, tetapi harus menjadi bagian integral dari budaya dan lingkungan sekolah secara berkelanjutan. Menjaga konsistensi dalam pendidikan karakter dan memastikan keberlanjutannya melibatkan tantangan dalam membangun komitmen jangka panjang dan

mempertahankan fokus pada pengembangan karakter.

8.5. Pengembangan Evaluasi Pembelajaran

Pengembangan evaluasi pembelajaran merupakan proses merancang dan mengembangkan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran penting untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik bagi pengembangan pembelajaran di masa depan. Berikut adalah beberapa langkah dalam pengembangan evaluasi pembelajaran:

1. Menentukan Tujuan Evaluasi: Menentukan tujuan evaluasi yang spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi harus berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dari peserta didik.
2. Memilih Bentuk Evaluasi: Memilih bentuk evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan jenis materi yang dievaluasi. Bentuk evaluasi dapat berupa tes tertulis, tugas proyek, penilaian kinerja, observasi, atau wawancara.

3. Mengembangkan Instrumen Evaluasi: Mengembangkan instrumen evaluasi yang sesuai dengan tujuan evaluasi. Instrumen evaluasi harus dapat mengukur dengan jelas dan obyektif tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Instrumen evaluasi dapat berupa soal tes, rubrik penilaian, daftar observasi, atau formulir penilaian.
4. Menentukan Skala Penilaian: Menentukan skala penilaian yang akan digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Skala penilaian dapat berupa angka, huruf, kategori, atau deskripsi tingkat pencapaian.
5. Menguji Validitas dan Reliabilitas: Melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen evaluasi yang telah dikembangkan. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengacu pada konsistensi dan ketepatan hasil evaluasi.
6. Mengatur Prosedur Evaluasi: Mengatur prosedur evaluasi, termasuk waktu, tempat, dan kondisi pelaksanaan evaluasi. Juga penting untuk menyediakan petunjuk yang jelas kepada

peserta didik tentang tugas evaluasi yang akan dilakukan.

7. Melaksanakan Evaluasi: Melakukan evaluasi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Memberikan arahan yang jelas kepada peserta didik tentang tugas evaluasi dan memberikan bimbingan jika diperlukan.
8. Menganalisis Hasil Evaluasi: Menganalisis hasil evaluasi untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Menginterpretasikan dan menggambarkan hasil evaluasi dengan menggunakan skala penilaian yang telah ditentukan.
9. Memberikan Umpan Balik: Memberikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil evaluasi. Umpan balik harus bersifat konstruktif, jelas, dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran di masa depan.
10. Melakukan Perbaikan: Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di masa depan. Merancang strategi pengembangan pembelajaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan peserta didik.

8.6. Evaluasi Kepribadian dan Keterampilan Sosial

Evaluasi kepribadian dan keterampilan sosial dalam pendidikan bertujuan untuk mengukur perkembangan dan kemajuan siswa dalam aspek-aspek non-akademik yang meliputi aspek kepribadian, sosial, emosional, dan keterampilan interpersonal. Evaluasi ini memberikan wawasan tentang kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, memecahkan konflik, bekerja dalam kelompok, dan berperilaku secara positif dalam berbagai situasi.

Berikut adalah beberapa metode evaluasi yang sering digunakan dalam evaluasi kepribadian dan keterampilan sosial pendidikan:

1. **Observasi:** Guru dan pengamat melakukan observasi langsung terhadap perilaku siswa dalam berbagai konteks, seperti kelas, kelompok kerja, dan kegiatan sosial. Observasi ini mencakup aspek perilaku, interaksi dengan teman sebaya, kepatuhan terhadap aturan, sikap, dan partisipasi dalam kegiatan sosial.
2. **Skala Penilaian:** Skala penilaian atau instrumen evaluasi berbentuk daftar pernyataan atau pertanyaan yang digunakan untuk menilai aspek-aspek tertentu dari kepribadian dan keterampilan sosial siswa. Skala penilaian ini

dapat mencakup penilaian diri siswa, penilaian oleh guru, penilaian oleh teman sebaya, atau kombinasi dari semuanya.

3. Portofolio: Siswa mengumpulkan dan menyimpan contoh-contoh pekerjaan atau proyek yang mencerminkan perkembangan kepribadian dan keterampilan sosial mereka. Portofolio ini mencakup refleksi siswa tentang pengalaman belajar, tindakan yang diambil, dan bukti prestasi dalam hal-hal seperti kerja tim, pemecahan masalah, komunikasi, dan pengelolaan emosi.
4. Wawancara: Guru atau konselor melakukan wawancara dengan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan persepsi mereka terkait dengan kepribadian dan keterampilan sosial. Wawancara ini dapat mencakup topik seperti hubungan dengan teman sebaya, interaksi dengan guru, penyelesaian konflik, dan pengelolaan emosi.
5. Tes Proyektif: Tes proyektif melibatkan penggunaan stimuli atau tugas kreatif untuk mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan perilaku siswa yang mungkin sulit diungkapkan

secara verbal. Tes ini dapat memberikan wawasan tentang aspek-aspek kepribadian dan keterampilan sosial siswa yang lebih dalam, seperti emosi yang dirasakan, persepsi diri, dan konflik internal.

8.7. Strategi Implementasi Pendidikan Karakter

Implementasi pendidikan karakter membutuhkan strategi yang terencana dan komprehensif untuk memastikan bahwa nilai-nilai karakter diterapkan secara efektif di lingkungan pendidikan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam implementasi pendidikan karakter:

1. **Pembiasaan Nilai-nilai Karakter:** Nilai-nilai karakter yang diinginkan harus ditanamkan melalui pembiasaan yang konsisten dan berkelanjutan. Ini melibatkan penerapan nilai-nilai karakter dalam rutinitas harian, kegiatan kelas, dan kegiatan sekolah lainnya. Guru dan staf sekolah perlu menjadi contoh yang baik dan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam semua aspek pembelajaran.
2. **Kurikulum Terintegrasi:** Pendidikan karakter harus terintegrasi dalam kurikulum secara menyeluruh. Nilai-nilai karakter harus

diidentifikasi dan diperjelas dalam tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan kegiatan evaluasi. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga siswa memiliki kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai karakter dalam situasi dunia nyata.

3. Penguatan Positif: Menggunakan penguatan positif seperti pujian, penghargaan, dan pengakuan untuk menguatkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter. Ini membantu memperkuat motivasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya nilai-nilai tersebut. Penguatan positif juga dapat melibatkan penghargaan atas prestasi karakter yang baik, seperti penghargaan siswa teladan atau penghargaan karakter bulanan.
4. Pelibatan Orang Tua dan Masyarakat: Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan karakter sangat penting. Orang tua perlu diberikan informasi dan sumber daya untuk mendukung penerapan nilai-nilai karakter di rumah. Sekolah juga dapat mengadakan kegiatan kolaboratif dengan masyarakat, seperti proyek sosial, kunjungan ke lembaga amal, atau

kegiatan bakti sosial, untuk memperkuat nilai-nilai karakter dalam konteks nyata.

5. Pemantauan dan Evaluasi: Proses implementasi pendidikan karakter perlu dipantau dan dievaluasi secara teratur. Pemantauan dan evaluasi ini membantu melihat keberhasilan implementasi, mengidentifikasi kekurangan atau tantangan yang muncul, dan membuat perbaikan yang diperlukan. Feedback dari siswa, guru, orang tua, dan staf sekolah lainnya juga penting dalam proses evaluasi ini.

BAB IX

TEKNOLOGI PENDIDIKAN

9.1. Pengertian Teknologi Pendidikan

Teknologi pendidikan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan beragam perangkat lunak dan perangkat keras pengajaran-dan-pembelajaran yang semakin banyak digunakan di ruang kelas perguruan tinggi dan universitas. Tujuan akhir dari teknologi pendidikan, juga disebut sebagai Ed Tech, adalah untuk memungkinkan lingkungan belajar yang lebih baik, yang pada gilirannya dimaksudkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Itu juga telah terbukti meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa di kelas. Teknologi pendidikan tidak dimaksudkan untuk menggantikan instruksi pendidik. Sebaliknya, itu dimaksudkan untuk melengkapi instruksi mereka dengan membuat kuliah lebih kolaboratif dan interaktif. EdTech menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan alat TI lainnya untuk meningkatkan keterlibatan dan membantu guru menyiapkan rencana pembelajaran, mengadakan kelas online, dan melakukan tugas sehari-hari seperti

penilaian dan kehadiran. Penggunaan EdTech meningkat hampir setiap hari dan bermanfaat bagi guru dan siswa di tingkat kelas K-12 dan mereka yang berada di pendidikan tinggi.

“Teknologi tidak akan pernah menggantikan guru yang hebat, tetapi di tangan guru yang hebat, teknologi itu transformasional,” kata George Couros, Instruktur Tambahan di Graduate School of Education di University of Pennsylvania dan penulis *The Innovator’s Mindset*.

Teknologi pendidikan mengacu pada teknologi yang biasanya membantu memfasilitasi kolaborasi dalam lingkungan belajar yang aktif. Ada sejumlah cara instruktur dapat menggunakan teknologi pendidikan di kelas. Ini termasuk membuat buku teks dinamis yang diisi dengan studi kasus khusus yang terkait dengan berita utama hari ini. Contoh lain penggunaan teknologi pendidikan adalah proses gamifikasi, di mana permainan dan aktivitas dimasukkan ke dalam pelajaran kelas untuk memperkuat konsep dengan cara yang menyenangkan. Kehadiran, tugas pekerjaan rumah, dan kuis juga dapat diberikan melalui teknologi pendidikan dan membantu pendidik mengukur siswa mana yang berkinerja tertinggi dan terendah. Teknologi pendidikan dapat digunakan untuk menghasilkan wawasan waktu nyata tentang materi, gaya, dan format pengajaran dan

dapat memberi siswa gambaran instan tentang kemajuan mereka sendiri.

Cabang pertama dari teknologi pendidikan adalah bidang "akademik". Ini melibatkan meninjau dan menganalisis proses belajar mengajar dari perspektif teknologi. Cabang kedua adalah area "praktis" dan menggabungkan penggunaan EdTech yang sebenarnya dalam pengaturan pendidikan.

Bersama-sama, topik ini berfokus pada penerapan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. EdTech mengambil berbagai bentuk, termasuk konferensi video, sistem manajemen pembelajaran, podcast, forum diskusi online, dan aplikasi dan game pendidikan. Jika digunakan dengan benar, EdTech dapat meningkatkan partisipasi, kreativitas, dan pemikiran analitis siswa. Di tahun-tahun mendatang, realitas virtual dan augmented dapat berkontribusi lebih banyak pada industri yang berkembang ini.

9.2. Peran Teknologi Pendidikan

Teknologi pendidikan mendobrak metode pendidikan dan pengajaran tradisional dengan menawarkan kepada guru dan siswa kemampuan untuk belajar di lingkungan yang menggunakan perangkat umum seperti smartphone, laptop, dan tablet. Perangkat

lunak termasuk Top Hat dianggap sebagai teknologi pendidikan. Top Hat memberi pendidik fleksibilitas untuk memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi, bermakna, dan setara. Courseware dinamis memberi siswa pengalaman membaca yang representatif dan relevan. Kuis dan diskusi memungkinkan siswa mendemonstrasikan pengetahuan mereka dalam kuliah atau sendiri. Sinyal waktu nyata dan wawasan pembelajaran—mulai dari kehadiran hingga kinerja polling—menawarkan indikasi otomatis keberhasilan siswa. Baca bagaimana para profesor ini menggunakan Top Hat untuk membuat pengajaran mereka lebih dinamis.

EdTech menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi pembelajaran siswa, meningkatkan keterlibatan siswa, dan meningkatkan kinerja siswa. Itu dapat merampingkan dan mempersonalisasi perencanaan pelajaran dan membantu mengawasi kemajuan siswa. Bagi siswa, teknologi dapat menciptakan partisipasi yang lebih besar, memungkinkan mereka belajar dengan kecepatan mereka sendiri, dan membuat belajar sedikit lebih menyenangkan.

9.3. Penerapan Teknologi Pendidikan

Guru dan sekolah dapat mengintegrasikan teknologi pendidikan ke dalam ruang kelas dengan berbagai cara. Perangkat lunak pendidikan, atau pembelajaran dengan bantuan komputer, memungkinkan guru menyesuaikan pelajaran. Hal tersebut juga menunjukkan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran matematika. Gamifying pemecahan masalah meningkatkan keterlibatan dan membantu membuat pembelajaran menjadi menyenangkan.

Pengingat pekerjaan rumah pesan teks otomatis dapat meningkatkan keterlibatan keluarga, dan model pembelajaran hybrid yang menggabungkan instruksi online dan tatap muka dapat menciptakan ruang kelas digital yang dapat diakses yang dapat diakses siswa kapan saja. Pengajar juga menggunakan EdTech untuk membantu tugas rutin, seperti penilaian otomatis untuk tugas objektif.

Sekolah dan guru menggunakan berbagai jenis teknologi di kelas. Contohnya termasuk ruang kelas virtual untuk pembelajaran online, papan tulis interaktif, papan buletin virtual, dan sistem manajemen konten.

Contoh teknologi pendidikan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir untuk memasukkan

kebangkitan 3D dan platform sensorik termasuk augmented reality, virtual reality dan kecerdasan buatan. Augmented reality (AR) adalah replikasi virtual dari dunia nyata yang mencakup pemandangan, suara, dan dalam beberapa kasus, rangsangan sensorik. Siswa anatomi mungkin menggunakan aplikasi AR untuk melihat diagram hati yang mendetail saat mengarahkan ponsel mereka ke gambar statis. Virtual reality (VR), di sisi lain, membenamkan pengguna dalam lingkungan yang sepenuhnya virtual yang sering kali dirender secara digital. Menggunakan headset, pengguna terbenam dalam ruang animasi atau digital. Siswa sejarah, misalnya, dapat melakukan perjalanan ke Museum Smithsonian menggunakan VR. Terakhir, alat kecerdasan buatan (AI) seperti Siri dan Alexa menggabungkan ilmu komputer dan pembelajaran mesin untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan tugas berdasarkan permintaan. Perangkat lunak seperti Turnitin dapat dianggap sebagai AI karena platform secara otomatis menandai perilaku yang mengindikasikan kecurangan.

BAB X

PENDIDIKAN INKLUSIF

10.1. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar yang setara bagi semua individu, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus atau berkebutuhan pendidikan lainnya. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif dan pengembangan potensi belajar bagi semua siswa, tanpa diskriminasi atau pemisahan berdasarkan perbedaan individu.

Dalam pendidikan inklusif, semua siswa diterima dan dihormati dalam lingkungan pembelajaran yang inklusif. Hal ini berarti bahwa siswa dengan kebutuhan khusus atau berkebutuhan pendidikan lainnya diajak untuk belajar bersama dengan siswa lainnya di kelas reguler. Lingkungan pembelajaran ini dirancang dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa, dengan memberikan dukungan, modifikasi kurikulum, dan sumber daya yang diperlukan.

Pendidikan inklusif berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung keragaman dan menghormati perbedaan antara siswa. Ini melibatkan kolaborasi antara guru, staf sekolah, siswa, orang tua, dan komunitas dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang inklusif. Tujuan utama pendidikan inklusif adalah menciptakan kesempatan belajar yang setara, meningkatkan partisipasi aktif siswa, dan mempromosikan pengembangan penuh potensi individu.

Pendidikan inklusif juga melibatkan penghapusan hambatan dan diskriminasi dalam sistem pendidikan. Ini termasuk pengembangan kebijakan, praktek, dan sarana yang memastikan aksesibilitas fisik, akses ke kurikulum yang relevan, dukungan emosional dan sosial, serta pelibatan aktif semua stakeholder dalam proses pembelajaran.

Pendidikan inklusif diakui sebagai sebuah hak asasi manusia dan merupakan fondasi untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Melalui pendidikan inklusif, diharapkan semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Berikut adalah pengertian pendidikan inklusif menurut para ahli yaitu :

1. UNESCO (2009) menyatakan, "Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan yang melibatkan semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, dalam lingkungan pembelajaran yang sama dengan menghargai keanekaragaman individu dan menyediakan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk belajar dan berkembang."
2. Ainscow dan Miles (2008) menjelaskan, "Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan yang berupaya mengatasi hambatan yang menghalangi partisipasi dan perkembangan belajar semua siswa, dengan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan individual mereka."
3. Booth dan Ainscow (2011) menyatakan, "Pendidikan inklusif berarti menerima semua siswa dengan segala perbedaan dan kebutuhan mereka, dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan partisipasi penuh, pembelajaran yang bermakna, dan kemajuan bagi semua siswa."

4. Florian dan Black-Hawkins (2011) menjelaskan, "Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan yang melibatkan semua siswa dalam pengalaman belajar yang bermakna, di mana perbedaan dihargai, dan di mana semua siswa diberikan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi secara aktif dan berhasil."
5. Farrell dan Ainscow (2002) menyatakan, "Pendidikan inklusif berfokus pada upaya membangun sekolah yang menerima semua siswa, tidak peduli dengan perbedaan mereka, dan menyediakan dukungan yang diperlukan agar semua siswa dapat belajar bersama secara efektif."
6. Thomas dan Loxley (2007) menjelaskan, "Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan yang melibatkan semua siswa dalam pengalaman pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan individu mereka, dengan memastikan bahwa semua siswa merasa diterima dan dihormati."
7. Booth (2003) menyatakan, "Pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan sekolah yang dapat menerima semua siswa, terlepas dari perbedaan mereka, dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan partisipasi

dan kemajuan belajar yang setara bagi semua siswa."

8. Loreman, Deppeler, dan Harvey (2014) menjelaskan, "Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan yang menghormati dan mengakui keanekaragaman siswa, serta berupaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyambut semua siswa dan mendorong partisipasi penuh mereka."
9. Florian (2008) menyatakan, "Pendidikan inklusif melibatkan semua siswa dalam lingkungan pembelajaran yang inklusif, dengan menghargai dan merespons perbedaan mereka, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencapai potensi belajar maksimal."
10. UNESCO (2017) menyatakan, "Pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia yang mendasar, yang mencakup semua aspek kehidupan siswa, dan menghargai serta memperkuat keanekaragaman budaya, bahasa, dan kebutuhan belajar."

10.2. Keberlanjutan Pendidikan Inklusif

Keberlanjutan pendidikan inklusif mencakup upaya untuk memastikan bahwa pendekatan inklusif

dalam pendidikan dapat berkelanjutan dan terus berkembang. Hal ini melibatkan tindakan jangka panjang yang mendukung dan mempromosikan prinsip-prinsip inklusi, serta memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus atau berkebutuhan pendidikan lainnya terus mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Beberapa aspek penting yang terkait dengan keberlanjutan pendidikan inklusif adalah:

1. Kebijakan dan peraturan: Penting untuk memiliki kebijakan dan peraturan yang jelas dan kuat yang mendukung pendidikan inklusif. Ini termasuk kebijakan yang melindungi hak-hak siswa dengan kebutuhan khusus, mengatur penggunaan dukungan dan sumber daya, dan mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.
2. Pelatihan dan pengembangan profesional: Guru dan staf pendidikan perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang mendukung pendekatan inklusif. Mereka perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang kebutuhan individu siswa serta strategi pembelajaran yang inklusif.
3. Rencana pembelajaran dan modifikasi kurikulum: Kurikulum perlu dirancang

sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan beragam siswa. Modifikasi kurikulum dan penggunaan strategi pembelajaran yang berbeda harus dilakukan untuk memfasilitasi partisipasi dan kemajuan belajar siswa dengan kebutuhan khusus.

4. Kolaborasi dan kemitraan: Kerja sama dan kolaborasi antara guru, staf sekolah, siswa, orang tua, dan komunitas sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan inklusif. Keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendekatan inklusif akan membantu memperkuat komitmen dan dukungan terhadap pendidikan inklusif.
5. Evaluasi dan pemantauan: Proses evaluasi dan pemantauan berkala perlu dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan pendekatan inklusif dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Ini akan membantu dalam melakukan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan agar pendidikan inklusif dapat berkelanjutan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Keberlanjutan pendidikan inklusif adalah kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua individu. Melalui upaya yang berkelanjutan, pendidikan inklusif dapat terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan siswa dan lingkungan pendidikan, sehingga semua siswa dapat meraih potensi belajar mereka secara optimal.

10.3. Lingkungan Pembelajaran Inklusif

Lingkungan pembelajaran inklusif menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi, belajar, dan perkembangan semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Tujuan dari lingkungan pembelajaran inklusif adalah untuk memastikan bahwa semua siswa merasa diterima, dihargai, dan didukung dalam proses pembelajaran. Beberapa aspek yang dapat membentuk lingkungan pembelajaran inklusif adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan dan penerimaan: Lingkungan pembelajaran inklusif harus mendorong keterbukaan dan penerimaan terhadap perbedaan. Siswa dengan kebutuhan khusus harus diterima dengan baik dan dianggap sebagai bagian integral dari komunitas pembelajaran.

2. Kolaborasi dan kerja tim: Kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah adalah kunci dalam menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan siswa dan pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai.
3. Pengaturan fisik yang ramah inklusi: Lingkungan fisik yang mendukung aksesibilitas, mobilitas, dan partisipasi siswa dengan kebutuhan khusus adalah penting dalam lingkungan pembelajaran inklusif. Ruang kelas yang dapat diakses dengan baik, fasilitas pendukung seperti kursi roda, dan tata letak yang fleksibel adalah beberapa contoh pengaturan fisik yang ramah inklusi.
4. Dukungan individual dan diferensiasi: Guru perlu memberikan dukungan individual kepada siswa dengan kebutuhan khusus, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Diferensiasi instruksional yang mempertimbangkan gaya belajar, tingkat kemampuan, dan minat siswa juga harus diterapkan.

5. Penggunaan teknologi pendidikan inklusif: Teknologi pendidikan dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif. Penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang sesuai dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam mengakses informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran.
6. Budaya inklusi: Lingkungan pembelajaran inklusif harus mencerminkan budaya inklusi yang mendorong saling pengertian, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Membangun iklim yang aman, hormat, dan bebas dari diskriminasi atau intimidasi adalah penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif.

Lingkungan pembelajaran inklusif berfokus pada prinsip kesetaraan, aksesibilitas, dan partisipasi bagi semua siswa. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, kita dapat memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai, terlibat, dan mampu mencapai potensi belajar mereka secara optimal.

10.4. Tantangan dan Hambatan dalam Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif menghadapi beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah beberapa tantangan dan hambatan yang umum dihadapi dalam pendidikan inklusif:

1. Ketidaktersediaan sumber daya yang memadai: Tantangan utama dalam pendidikan inklusif adalah ketidaktersediaan sumber daya yang memadai, termasuk tenaga pendidik yang terlatih, dukungan khusus, peralatan, dan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran: Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pendidikan inklusif di kalangan pendidik, orang tua, dan masyarakat umum dapat menjadi hambatan dalam menerapkan praktik inklusif. Pendidik dan masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus dan manfaat dari pendidikan inklusif.
3. Stigma dan diskriminasi: Siswa dengan kebutuhan khusus sering menghadapi stigma

dan diskriminasi dalam lingkungan pendidikan. Perlunya mengatasi stigma dan diskriminasi ini, serta menciptakan budaya inklusi yang menghargai perbedaan, menjadi tantangan yang perlu diatasi.

4. Kurangnya kolaborasi dan koordinasi: Kolaborasi yang kurang antara pendidik, staf pendukung, dan pihak terkait lainnya dapat menjadi hambatan dalam menyediakan dukungan yang komprehensif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Koordinasi yang efektif dan kolaborasi antarpihak adalah kunci keberhasilan pendidikan inklusif.
5. Keterbatasan waktu dan ruang: Dalam konteks kelas yang penuh dengan siswa dengan kebutuhan khusus, keterbatasan waktu dan ruang dapat menjadi tantangan. Pendidik perlu mengelola waktu dan ruang dengan baik untuk memenuhi kebutuhan semua siswa dengan cara yang inklusif.
6. Penilaian yang tidak sesuai: Penilaian yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus dapat menjadi hambatan dalam pendidikan inklusif. Perlunya pengembangan penilaian yang inklusif dan

responsif terhadap kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus.

7. Kurangnya dukungan orang tua: Kurangnya dukungan dan keterlibatan orang tua dalam pendidikan inklusif dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan inklusi. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara sekolah dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.

Mengatasi tantangan dan hambatan dalam pendidikan inklusif membutuhkan komitmen dan kerjasama semua pihak terkait, termasuk pendidik, staf pendukung, orang tua, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan.

10.5. Dukungan Psikososial bagi Siswa dengan Kebutuhan Khusus

Dukungan psikososial merupakan komponen penting dalam pendidikan inklusif untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Dukungan ini mencakup upaya untuk memenuhi kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis siswa agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan merasa diterima dalam lingkungan pendidikan. Berikut ini adalah beberapa bentuk dukungan psikososial yang

dapat diberikan kepada siswa dengan kebutuhan khusus:

1. Penerimaan dan pengakuan: Penting bagi siswa dengan kebutuhan khusus untuk merasa diterima dan diakui dalam lingkungan pendidikan. Dukungan psikososial harus mencakup penerimaan terhadap keunikan dan perbedaan siswa, serta mempromosikan budaya inklusi yang menghargai semua individu.
2. Pembinaan hubungan sosial: Siswa dengan kebutuhan khusus mungkin mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan sosial. Dukungan psikososial harus melibatkan upaya untuk membantu siswa membangun keterampilan sosial, memperluas jaringan pertemanan, dan merasa terhubung dengan teman sekelas mereka.
3. Konseling dan dukungan emosional: Siswa dengan kebutuhan khusus mungkin menghadapi tantangan emosional yang berbeda. Dukungan psikososial harus mencakup akses terhadap konselor atau ahli terkait yang dapat memberikan dukungan emosional, membantu

siswa mengatasi stres, kecemasan, atau masalah emosional lainnya.

4. Pembangunan kepercayaan diri: Dukungan psikososial harus memberikan kesempatan bagi siswa dengan kebutuhan khusus untuk mengembangkan rasa percaya diri mereka. Ini dapat dilakukan melalui pemberian tugas atau proyek yang sesuai dengan kemampuan mereka, memberikan pujian dan pengakuan atas prestasi mereka, serta memotivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang.
5. Pembinaan resiliensi: Siswa dengan kebutuhan khusus mungkin menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam proses pembelajaran. Dukungan psikososial harus membantu siswa mengembangkan resiliensi, yaitu kemampuan untuk mengatasi kesulitan, menghadapi kegagalan, dan bangkit kembali. Ini melibatkan pembinaan ketahanan mental dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman yang sulit.
6. Partisipasi aktif: Dukungan psikososial harus mendorong partisipasi aktif siswa dengan kebutuhan khusus dalam kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler. Ini dapat meliputi dukungan

untuk mengatasi hambatan fisik atau komunikasi, serta penyediaan lingkungan yang inklusif yang mendorong partisipasi semua siswa.

Dukungan psikososial bagi siswa dengan kebutuhan khusus merupakan komponen penting dalam pendidikan inklusif. Hal ini membantu siswa merasa diterima, mendapatkan dukungan emosional, dan mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan pendidikan. Melalui dukungan yang tepat, siswa dengan kebutuhan khusus dapat mencapai potensi penuh mereka dan meraih kesuksesan akademik dan sosial.

10.6. Kolaborasi dan Partisipasi dalam Pendidikan Inklusif

Kolaborasi dan partisipasi merupakan prinsip penting dalam pendidikan inklusif. Mereka melibatkan kerja sama antara semua stakeholder yang terlibat dalam pendidikan, termasuk guru, siswa, orang tua, staf sekolah, ahli pendidikan khusus, dan komunitas setempat. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang kolaborasi dan partisipasi dalam pendidikan inklusif:

1. Kolaborasi antara guru dan ahli pendidikan khusus: Kolaborasi antara guru reguler dan ahli pendidikan khusus sangat penting dalam pendidikan inklusif. Mereka harus bekerja sama dalam merencanakan pembelajaran, menyusun strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa, dan mengevaluasi kemajuan belajar secara terpadu.
2. Kolaborasi dengan orang tua: Orang tua memiliki peran kunci dalam pendidikan inklusif. Kolaborasi dengan orang tua sangat penting dalam memahami kebutuhan dan keunikan siswa, serta dalam merencanakan program pembelajaran yang sesuai. Orang tua juga dapat memberikan informasi dan wawasan tentang kemampuan dan minat anak mereka.
3. Partisipasi siswa: Siswa harus aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, evaluasi, dan penilaian pembelajaran. Partisipasi siswa memungkinkan mereka untuk merasa memiliki pengalaman belajar mereka sendiri dan merasa dihargai dalam lingkungan pendidikan.

4. Kolaborasi dengan staf sekolah dan komunitas:
Kolaborasi dengan staf sekolah dan komunitas setempat dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Melibatkan staf sekolah, seperti petugas kesehatan, konselor, atau petugas layanan sosial, dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi siswa. Kolaborasi dengan komunitas juga dapat memberikan sumber daya dan kesempatan untuk pengalaman belajar di luar kelas.
5. Pembinaan kerjasama antar siswa: Penting untuk membina kerjasama dan persahabatan antar siswa dengan dan tanpa kebutuhan khusus. Dengan mendorong interaksi positif dan saling pengertian antar siswa, lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang inklusif dan ramah bagi semua siswa.

Kolaborasi dan partisipasi dalam pendidikan inklusif menghasilkan lingkungan belajar yang mendukung, saling terhubung, dan responsif terhadap kebutuhan semua siswa. Mereka mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman,

menghargai perbedaan, dan membangun komunitas yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: What are the levers for change? *Journal of Educational Change*, 6(2), 109-124.
- Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making Education for All Inclusive: Where Next? *Prospects*, 38(1), 15-34.
- Airasian, P. W., & Russell, M. K. (2012). *Classroom Assessment: Concepts and Applications*. McGraw-Hill Education.
- Aliminsyah & Padji (2004). *Kamus Istilah Manajemen*. Jakarta: CV.Yrama Widya.
- Ambarini, R., Seityaji, A., & Zahraini, D.A (2018). Inteiractivei Media in Einglish for Math at Kindeirgartein: Suipporting Leiarning, Languiagei and Liteiracy with ICT. *Arab World English Jouirnal (AWEiJ) Speical Issuieie on CALL* (4), pp.227-241
- Anderson, G., & Herr, K. (Eds.). (2018). *The Routledge Handbook of International Education and Development*. Routledge.

Anderson, L. W. (Ed.). (2008). International encyclopedia of the social sciences (Vol. 7). Macmillan Reference USA.

Arsyad, A. (2011). Media Pembelajaran. Jakarta : PT. Raja Grafindo Peirsada

Artiles, A. J., Kozleski, E. B., Dorn, S., & Christensen, C. (2006). Learning in inclusive education research: Re-mediating theory and methods with a transformative agenda. *Review of Research in Education*, 30(1), 65-108.

Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). (2018). Whole child development: Fostering social-emotional learning through a focus on well-being. ASCD.

Baker, D.P., Goesling, B., & LeTendre, G.K. (Eds.). (2002). National Differences, Global Similarities: World Culture and the Future of Schooling. Stanford University Press.

Batuibara, H. H. (2020). Media Pembelajaran Eifeiktif. Seimarang: Fatawa Puiblishing.2 Media Pembelajaran Eifeiktif Adisapuitro, G. (2017). Anggaran Bisnis; Analisis, Peirancangan, dan Peingeindalian Laba.

- Berkowitz, M. W. (2002). The science of character education. In D. L. Glickman (Ed.), *The basics of character education* (pp. 43-59). ERIC Clearinghouse on Educational Management.
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2004). *What works in character education: A research-driven guide for educators*. Character Education Partnership.
- Berliner, D. C. (2009). Poverty and potential: Out-of-school factors and school success. *Teachers College Record*, 112(5), 1299-1333.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives, handbook I: The cognitive domain*. David McKay Company.
- Booth, T. (2003). *Developing Inclusive Schools: A Systematic Review*. *British Journal of Special Education*, 30(1), 3-12.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2011). *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Center for Studies on Inclusive Education.
- Bray, M., Adamson, B., & Mason, M. (Eds.). (2014). *Comparative Education Research: Approaches and Methods*. Springer.

- Bray, M., Adamson, B., & Mason, M. (Eds.). (2014). Comparative Education Research: Approaches and Methods. Springer.
- Briggs, L. J., Gustafson, K. L., & Tillman, M. H. (2003). Instructional Design: Principles and Applications. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Brigham, Ei. F., & Daveis, P. R. (2014). *Inteirmediatei financial manageimeint*. Ceingagei Leiarning.
- Brookhart, S. M. (2013). Educational Assessment Knowledge and Skills for Teachers. Jossey-Bass.
- Cairns, J., & Gardner, W. (2019). Education Policy: An Introduction. Routledge.
- Carnoy, M., & Rhoten, D. (Eds.). (2002). The Transformation of U.S. Research Education: Multidisciplinary Perspectives. University of Chicago Press.
- Christina, Ei., & Fuiad, M. (2001). Anggaran Peirusahaan: Suiatui Peindeikatan Praktis. *Jakarta: Gramedia Puistaka Utama*.

- Cremin, L. A. (1961). *The transformation of the school: Progressivism in American education, 1876-1957*. Vintage Books.
- Cuban, L. (1984). *How teachers taught: Constancy and change in American classrooms, 1890-1980*. Longman.
- Dalei, Ei. (1969). *Audiovisual Meithod in Teiaching. (Third Eidition)*. Neiw York :Thei Drydein Preiss, Holt, Rineihart and Winston, Inc.
- Depdiknas, (2001). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Konsep dan Pelaksanaan*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. Macmillan.
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405-432.
- Eikayani, P. (2017). *Peintingnya peingguinan media peimbeilajaran uintuik meiningkatkan preistasi*

belajar siswa. *Juurnal Fakuiltas Ilmui Peindidikan Univeirsitas Peindidikan Ganeisha Singaraja*, 2(1), 1-11.

Elliot, S. N., Gresham, F. M., & Elliot, S. N. (2008). Social skills improvement system: Rating scales. Pro-Ed.

Farrell, P., Ainscow, M., & Tweddle, D. (2018). Making schools more inclusive: Overcoming barriers to learning and participation. Routledge.

Fischman, G. E., & Haas, E. (Eds.). (2016). Global perspectives on teacher education. Routledge.

Florian, L. (2008). Inclusion and the standards agenda: negotiating policy pressures in England. *European Journal of Special Needs Education*, 23(2), 115-131.

Florian, L., & Black-Hawkins, K. (Eds.). (2011). Exploring inclusive educational practices through professional inquiry. Routledge.

Friend, M., & Bursuck, W. D. (2018). Including students with special needs: A practical guide for classroom teachers. Pearson.

- Fullan, M. (2016). *The new meaning of educational change*. Teachers College Press.
- Fullan, M., Hill, P., & Crevola, C. (2006). *Breakthrough*. Corwin Press.
- Gaffar. (1987). *Perencanaan Pendidikan Teori dan Metodologi*. Jakarta: P2LPTK Ditjen Dikti - Depdikbud.
- Gardner, H. (1993). *Multiple intelligences: The theory in practice*. Basic Books.
- Grissom, J. B., & Harrington, J. R. (2010). Social skills interventions for students with emotional/behavioral disorders: A meta-analysis. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 18(4), 275-290.
- Gronlund, N. E., & Brookhart, S. M. (2009). *Assessment of Student Achievement (9th Edition)*. Boston, MA: Pearson.
- Gronlund, N. E., & Brookhart, S. M. (2009). *How to make standards-based grading work for you*. Association for Supervision and Curriculum Development.

- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth generation evaluation. Sage Publications.
- Guskey, T. R. (2000). Evaluating professional development. Corwin Press.
- Guskey, T. R. (2002). How's my kid doing? A parent's guide to grades, marks, and report cards. Jossey-Bass.
- Hallak, J., & Mundy, K. (2013). World Education Report 2013/4: Teaching and Learning: Achieving Quality for All. UNESCO.
- Halpin, D. (2019). Handbook of Research on Teaching Methods in Language Translation and Interpretation. IGI Global.
- Hamalik, Oemar. (2007) *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, Oemar. (2007) *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Handoko, T. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, S. S. (2001). *Budgeting Peinganggaran Peireencanaan Leingkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Hasibuan, M. S. P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Heneveld, W., & Craig, H. (2019). *The World Bank and Education: Critiques and Alternatives*. Routledge.
- Herman, J. L., Osmundson, E., & Silver, D. (2015). The Ethics of Testing: A Review and Recommendations. *Educational Measurement: Issues and Practice*, 34(2), 13-22.
- Hodkinson, A., & Vickerman, P. (2009). *Key issues in special educational needs and inclusion*. Routledge.
- Huisman, J., & van der Wende, M. (Eds.). (2018). *The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance*. Palgrave Macmillan.
- Huitt, W., & Hummel, J. (2003). *Moral and character development*. Educational Psychology Interactive.
<https://www.edpsycinteractive.org/topics/morchar/morcarde.html>
- Jacobs, H. H. (2010). *Curriculum 21: Essential education for a changing world*. ASCD.

- Kilpatrick, W. H., & Wolfe, D. E. (2001). Lessons from character education in America's schools: An analysis of the nation's most popular character education programs and materials. Character Education Partnership.
- Komariah, A dan Triatna, C (2006), *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kristanto, Andi. (2016). *Media Pembelajaran*. Suirabaya: Bintang Suitabaya
- Labaree, D. F. (2010). Someone has to fail: The zero-sum game of public schooling. Harvard University Press.
- Labaree, D. F. (2018). A perfect mess: The unlikely ascendancy of American higher education. University of Chicago Press.
- Lee, W. O. (2012). Educational policies on character education in Japan, Korea, and the United States: Cases of Japan's moral education, Korea's moral education, and the United States' character education. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(7), 56-65.

- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Lickona, T. (2013). The challenges of teaching character in a diverse and divided society. *Journal of Research in Character Education*, 9(1), 37-54.
- Lickona, T., & Davidson, M. (2005). *Smart & good high schools: Integrating excellence and ethics for success in school, work, and beyond*. Center for the 4th and 5th Rs.
- Lickona, T., Schaps, E., & Lewis, C. (Eds.). (2010). *Eleven principles of effective character education*. Josephson Institute.
- Loreman, T., Deppeler, J., & Harvey, D. (2014). *Inclusive education: Supporting diversity in the classroom*. Routledge.
- Mangkunegara, A. A. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Marzano, R. J. (2003). *What works in schools: Translating research into action*. ASCD.

- Matson, J. L., & Sturmey, P. (2011). *International handbook of autism and pervasive developmental disorders*. Springer.
- McMillan, J. H., & Hearn, J. (2015). Student Engagement in Assessment: What, Why, and How. *Theory into Practice*, 54(1), 14-20.
- McTighe, J., & Wiggins, G. (2013). *Essential questions: Opening doors to student understanding*. ASCD.
- Mertens, D. M. (2014). *Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods*. Sage Publications.
- Ministry of Education, Singapore. (2019). *Values Education*.
<https://www.moe.gov.sg/education/programmes/values-education>
- Mok, K. H. (Ed.). (2019). *Comparative and International Education: Issues for Teachers*. Springer.
- Morrison, G. R., Ross, S. M., Kalman, H. K., & Kemp, J. E. (2019). *Designing Effective Instruction* (8th Edition). Hoboken, NJ: Wiley.

- Mudyahardjo, R. (2002). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasri (2014). Peran manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. *Pandawa: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 2(1), 166-179.
- Nawawi, (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Nucci, L. (2008). Moral education in the United States. Encyclopedia on Early Childhood Development. <http://www.child-encyclopedia.com/moral-development/according-experts/moral-education-united-states>
- Nucci, L. (2009). Education for moral development: Kohlberg's stages of moral development and their relevance to education. Encyclopedia on Early Childhood Development.
- Nucci, L. (2010). Education in the moral domain. Cambridge University Press.

- Nucci, L. P., Narvaez, D., & Krettenauer, T. (Eds.). (2014).
Handbook of moral and character education.
Routledge.
- Ornstein, A. C., Hunkins, F. P., & Murray, C. (2018).
Curriculum: Foundations, Principles, and Issues
(7th Edition). Boston, MA: Pearson.
- Patton, M. Q. (2008). Utilization-focused evaluation (4th
ed.). Sage Publications.
- Popham, W. J. (2008). Classroom assessment: What
teachers need to know. Pearson.
- Popham, W. J. (2008). Ethics in Assessment. Routledge.
- Posner, G. J. (2004). Analyzing the Curriculum. Boston,
MA: McGraw-Hill.
- Ravitch, D. (2000). Left back: A century of failed school
reforms. Simon & Schuster.
- Reigeluth, C. M., & Carr-Chellman, A. A. (2009).
Instructional-Design Theories and Models:
Building a Common Knowledge Base (Vol. III).
New York, NY: Routledge.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2010). *Manajemen, Edisi
Kesempuluh*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Rury, J. L. (2005). *Education and social change: Themes in the history of American schooling*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Ryan, K. E., & Bohlin, K. E. (1999). *Building character in schools: Practical ways to bring moral instruction to life*. Jossey-Bass.
- Sadker, D.M., Sadker, M.P., & Zittleman, K.R. (2018). *Teachers, Schools, and Society: A Brief Introduction to Education*. McGraw-Hill Education.
- Sanjaya, Wina. (2008) *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Sawiyanto. 2011. Peingeirtian dan Peirbeidaan Daya Seirap peiseirta didik (Online), teirseidia <https://sawiyanto.blogspot.com/2011/12/peingeirtian-dan-peirbeidaan-daya-seirap.html?m=1>
- Schein, E. H. (2008). *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Scherer, M. (Ed.). (2017). *Ethical Dilemmas in Assessing Learning and Social Responsibility*. Springer.

- Schriewer, J. (2015). *Theories and Methods in Comparative Education*. Bloomsbury Academic.
- Scriven, M. (1991). *Evaluation thesaurus* (4th ed.). Sage Publications.
- Seligman, M. E., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. *Oxford Review of Education*, 35(3), 293-311.
- Sellar, S., & Lingard, B. (2013). *Education Policy as Numbers: Data-based Governance in an Era of Accountability*. Routledge.
- Sjøberg, S., & Knapstad, M. (Eds.). (2017). *Education Systems and Inequalities: International Comparisons*. Springer.
- Smaldino, Sharon Ei, Jameis D. Ruisseil, Robeirt Heiinich, Michaeil Moleinda. 2008. *Instruictional Teichnology and Media for Leiarning*. Ohio: Peiarson Meirrill Preinticei Hall.
- Smith, P. L., & Ragan, T. J. (2005). *Instructional Design* (3rd Edition). Hoboken, NJ: Wiley.

- Sobe, N. W., & Wiley, T. G. (Eds.). (2004). *Critical issues in education: Dialogues and dialectics*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Solano-Flores, G. (2018). *Ethics of Educational Assessment*. In *Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions* (pp. 1-6). Springer.
- Solberg, V. S., & Olweus, D. (2003). *Preparing students for a changing world: A handbook for middle schools and teachers*. Center for the Study and Prevention of Violence, Institute of Behavioral Science, University of Colorado.
- Spring, J. (2019). *American Education* (18th ed.). Routledge.
- Squires, D., & Huot, S. (2016). *Comparative and International Education: Issues for Teachers*. Palgrave Macmillan.
- Stake, R. E. (2004). *Standards-based and responsive evaluation*. Sage Publications.
- Stiggins, R. J., Arter, J. A., Chappuis, J., & Chappuis, S. (2006). *Classroom Assessment for Student Learning: Doing It Right—Using It Well*. Pearson.

- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation theory, models, and applications. John Wiley & Sons.
- Suisilana, R., & Riyana, C. (2008). *Media peimbeilajaran: hakikat, peingeimbangan, peimanfaatan, dan peinilaian*. CV. Wacana Prima.
- Sukirno, S. (2006). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sulfemi, Wahyu Bagja. (2018) *Manajemen Kurikulum Di dalam Sekolah*. Bogor: Visi Nusantara Maju.
- Swaffield, S. (2011). Getting to the Heart of Authentic Assessment for Learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 18(4), 433-449.
- Terry, G. R. (1964). *Principles of Management*. Richard Irwin, Inc. Home Wood. Illions.
- Terry, G. R. (2010). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thomas, G., & Loxley, A. (2007). Deconstructing special education and constructing inclusion. McGraw-Hill Education.

- Trowler, V., & Cooper, A. (Eds.). (2017). *Teaching and Learning in Higher Education: Disciplinary Approaches to Educational Enquiry*. Routledge.
- Tyack, D., & Cuban, L. (1995). *Tinkering toward utopia: A century of public school reform*. Harvard University Press.
- Tyler, R. W. (2013). *Basic principles of curriculum and instruction*. University of Chicago Press.
- Ukas, M. (2004). *Manajemen, Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Agnini.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO. (2009). *Inclusive Education: The Way of the Future*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2009). *Policy guidelines on inclusion in education*. UNESCO.
- UNESCO. (2017). *Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges*. UNESCO
- UNESCO. (2017). *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All*. Paris: UNESCO.

Usman, H. (2014). *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<https://www.seputarpengetahuan.co.id>

Verger, A., Novelli, M., & Altinyelken, H. K. (Eds.). (2016). *Global Education Policy and International Development: New Agendas, Issues, and Policies*. Bloomsbury Academic.

Villa, R. A., Thousand, J. S., & Nevin, A. (2010). *A guide to co-teaching: Practical tips for facilitating student learning*. Corwin Press.

Warsita Bambang, *Teiknologi Peimbeilajaran Landasan & Aplikasinya*, Jakarta: Rineika Cipta, 2008).

Weiler, H. N., & Horsfall, D. (Eds.). (2017). *Handbook of Comparative Studies on Community Colleges and Global Counterparts*. Springer.

Westbury, I., Hopmann, S., & Riquarts, K. (Eds.). (2000). *Teaching as a reflective practice: The German didaktik tradition*. Lawrence Erlbaum Associates.

- Wiggins, G. (1998). *Educative assessment: Designing assessments to inform and improve student performance*. Jossey-Bass.
- Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by Design* (2nd Edition). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
- Wijayanti, I. D. S. (2008). *Manajemen*, Editor: Ari Setiawan. Yogyakarta: Mitra Cendikia.
- Wiliam, D. (2011). *Embedded Formative Assessment*. Solution Tree Press.
- Yamin, M. (2009). *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Yogyakarta: Diva Press.
- Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (Eds.). (2004). *Building academic success on social and emotional learning: What does the research say?*. Teachers College Press.
- Zymelmen, M. (1975). *Pembiayaan dan Efisiensi Pendidikan: Referensi untuk Administrasi dan Pembuatan Keputusan*. Harvard University.

KONSEP DASAR SISTEM PENDIDIKAN

Prinsip-prinsip sistem pendidikan mencakup universalitas, kesetaraan, kesinambungan, relevansi, dan efisiensi. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan tentang bagaimana sistem pendidikan harus dirancang dan dijalankan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, tujuan sistem pendidikan adalah untuk memberdayakan individu, mengembangkan masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan-tujuan ini mencerminkan pentingnya pendidikan dalam menciptakan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.



IKAPI
INDONESIAN ASSOCIATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS



Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri



ISBN 978-623-8157-67-9



9 786238 157679